

BAB 6

AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENGUATAN KEBIJAKAN STRUKTURAL DAN KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan, transformasi sektor riil perlu terus diperkuat melalui kebijakan struktural yang menjadi fondasi kebijakan industrialisasi. Penguatan kebijakan struktural dilakukan melalui perbaikan iklim investasi, penciptaan persaingan usaha yang sehat, peningkatan keandalan infrastruktur, serta penguatan kerja sama perdagangan dan investasi. Sementara kebijakan industrialisasi diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, memperkuat basis manufaktur, dan memperbaiki ketahanan eksternal. Industrialisasi yang ditopang oleh reformasi struktural sebagai fondasi akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan manfaat yang lebih merata, sehingga memperkuat stabilitas nasional.





Bauran kebijakan nasional dari sisi permintaan dan penawaran sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Dari sisi permintaan, sinergi antara kebijakan fiskal Pemerintah, kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia, serta koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu terus dipererat untuk mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dari sisi penawaran, peningkatan kapasitas perekonomian perlu terus dilakukan melalui kenaikan nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan transformasi sektor riil melalui kebijakan struktural dan industrialisasi perlu ditempuh untuk terus meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas bagi kenaikan nilai tambah produksi dari sektor-sektor ekonomi tersebut.

Strategi penguatan kebijakan struktural dan kebijakan industrialisasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan kapasitas perekonomian. Kebijakan struktural sebagai fondasi diarahkan untuk perbaikan iklim investasi, penciptaan persaingan usaha yang sehat, peningkatan konektivitas dan keandalan infrastruktur (fisik dan digital), serta penguatan kerja sama perdagangan dan investasi. Sementara itu, kebijakan industrialisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produksi dari sektor-sektor ekonomi tertentu yang menjadi prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penciptaan lapangan kerja yang besar, termasuk di antaranya industrialisasi dan hilirisasi khususnya berbasis sumber daya alam (SDA).

6.1. Konsep Kebijakan Struktural dan Industrialisasi

Kebijakan struktural merupakan aspek penting dalam transformasi ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berdaya tahan. Dalam literatur modern, kebijakan struktural seringkali didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mereformasi struktur ekonomi secara fundamental. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan makroekonomi jangka

pendek karena fokus kepada perubahan sistemik yang bersifat jangka panjang. Pada praktiknya, kebijakan struktural secara umum mencakup perbaikan regulasi dan tata kelola, peningkatan iklim usaha, serta reformasi di pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, dan sistem keuangan. IMF (2024) menekankan bahwa reformasi struktural dapat mendorong produktivitas, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui pengurangan hambatan masuk/keluar dan peningkatan daya saing serta perbaikan kebijakan pasar tenaga kerja.

Secara teori, kebijakan struktural berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan sisi penawaran melalui tiga kanal utama. Ketiga kanal tersebut yakni (i) peningkatan produktivitas dan efisiensi alokasi sumber daya; (ii) pendalaman modal dan investasi melalui biaya berusaha yang lebih rendah dan pembiayaan yang lebih tersedia; serta (iii) peningkatan partisipasi dan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan insentif dan mobilitas di pasar kerja (Égert, 2017). Reformasi pada pasar produk, pasar tenaga kerja, serta kualitas regulasi dan institusi berfungsi sebagai pengungkit untuk memperbaiki insentif ekonomi, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing.

Ketiga kanal tersebut pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan faktor produksi. Reformasi regulasi dan perbaikan iklim investasi serta reformasi di pasar barang dan jasa, tenaga kerja, dan keuangan menarik investasi sehingga meningkatkan akumulasi modal, kapasitas produksi, dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kebijakan struktural melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kebijakan struktural juga berperan penting dalam mendorong kemajuan teknologi sehingga dapat meningkatkan *total factor productivity* (TFP).

Kebijakan industrialisasi diartikan sebagai kebijakan yang ditempuh suatu negara untuk memperkuat struktur ekonomi domestiknya melalui peningkatan sektor industri. Secara teori, kebijakan industrialisasi berkontribusi terhadap



pertumbuhan ekonomi melalui perubahan struktur ekonomi yang dapat meningkatkan kapasitas perekonomian. Peningkatan pemanfaatan teknologi di sektor industri meningkatkan produktivitas melalui efisiensi proses, peningkatan kualitas, dan pengurangan biaya. Industrialisasi yang menandakan peralihan dari sektor tradisional menuju sektor modern juga mendorong penciptaan lapangan kerja mulai dari konstruksi pabrik, operasional, hingga efek berganda ke sektor-sektor pendukungnya. Selain itu, industrialisasi juga mendorong peningkatan stok kapital karena membutuhkan investasi yang besar.

Industrialisasi merupakan prasyarat pembangunan ekonomi sebelum memasuki masa pertumbuhan tinggi (*take-off*). Rostow (1960) menekankan bahwa sebelum suatu negara mencapai tahap *take-off*, harus melalui perubahan fundamental berupa pergeseran dari dominasi sektor pertanian menuju aktivitas sektor industri. Transformasi menuju sektor industri ini mencakup modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, dan alokasi sumber daya menuju kegiatan nonpertanian, termasuk industri pengolahan.

Kebijakan industrialisasi dilakukan melalui instrumen kebijakan Pemerintah yang berorientasi pada peningkatan peran sektor industri. IMF (2025) membagi instrumen kebijakan industrialisasi menjadi tiga, yaitu subsidi pembiayaan (*subsidized financing*), bantuan langsung (*direct support*), dan instrumen kebijakan lainnya. Subsidi pembiayaan, umumnya diarahkan untuk mengurangi hambatan pembiayaan sektor tertentu, antara lain melalui skema subsidi bunga, penjaminan, dan pembiayaan bersubsidi. Sementara itu, bantuan langsung diberikan dalam bentuk transfer seperti hibah dan bantuan pendanaan langsung untuk mendorong investasi, inovasi, dan peningkatan kapasitas produksi. Selain subsidi pembiayaan dan bantuan langsung, kebijakan industri juga kerap berbentuk kebijakan proteksionis, seperti tarif dan hambatan nontarif, yang ditujukan untuk melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri (Aiyar, et al., 2025; Criscuolo et al., 2022).

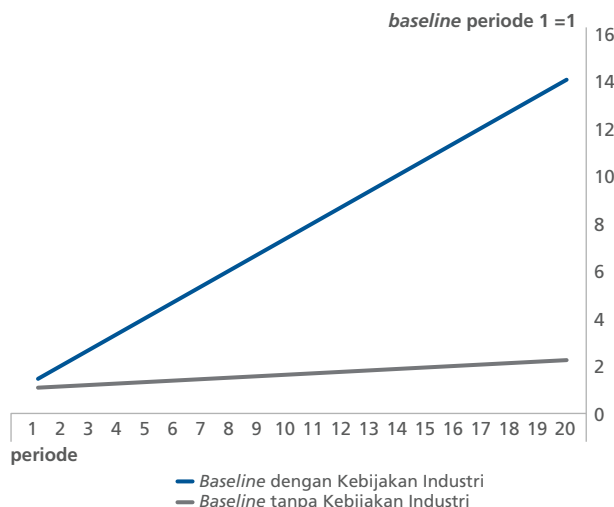
Motivasi kebijakan industrialisasi didasarkan pada kebutuhan untuk merespons kegagalan pasar (*market failures*) dan memperkuat daya saing sektor-sektor domestik yang potensial, namun belum mampu bersaing secara global. OECD (2024) dan IMF (2024) menegaskan bahwa mekanisme pasar sering kali gagal mengalokasikan sumber daya ke sektor bernilai tambah tinggi karena adanya eksternalitas pembelajaran (*learning by doing*) dalam pengembangan industri pemula (*infant industry*), keterbatasan pembiayaan jangka panjang untuk sektor berisiko tinggi, serta kegagalan koordinasi investasi lintas sektor. Sebagai contoh, mekanisme pasar belum mampu mendorong investasi di sektor teknologi canggih seperti semikonduktor dan energi terbarukan akibat tingginya risiko dan biaya awal (IMF, 2024). Namun di sisi lain, manfaat kebijakan industri dalam meningkatkan kapasitas produksi disertai dengan kenaikan risiko fiskal dan inflasi. Simulasi IMF (2025) menunjukkan bahwa skenario intervensi kebijakan industri berupa subsidi produksi sebesar 10% dan tarif sebesar 12% pada sektor strategis, mendorong kenaikan volume produksi serta penurunan biaya produksi (Grafik 6.1. dan 6.2.). TFP secara agregat meningkat disertai dengan dampak rambatan positif terhadap sektor lain. Namun demikian, hasil simulasi juga menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memerlukan beban fiskal yang mencapai $\pm 5,5\%$ dari PDB setiap tahun dalam bentuk subsidi. Selain itu, dalam jangka pendek, industrialisasi memicu kenaikan harga barang pada tingkat konsumen, antara lain melalui kenaikan permintaan bahan baku, energi, dan tenaga kerja.

Kebijakan industrialisasi juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu dicermati.

Pertama, peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi pada masa awal proses transisi. Industrialisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, namun tidak merata sehingga memicu kenaikan ketimpangan. Namun ketimpangan tersebut akan menurun setelah mencapai titik baliknya mengikuti *Kuznetsion tension* (Ansari, 2023). *Kedua*, dampak industrialisasi pada lingkungan hidup berupa berkurangnya SDA, kerusakan lingkungan, serta



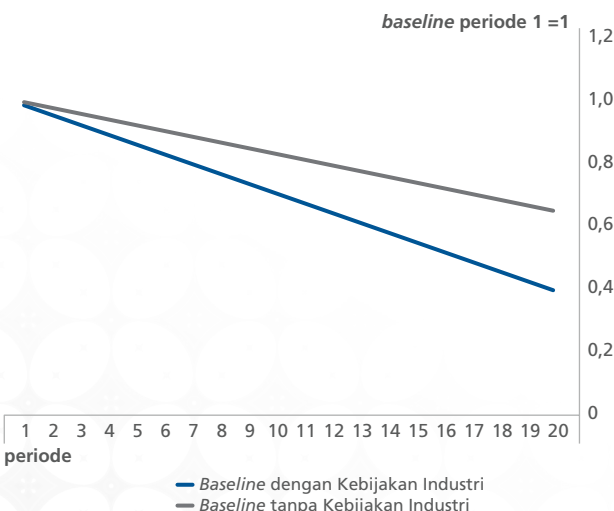
Grafik 6.1. Ilustrasi Simulasi Dampak Kebijakan Industri terhadap Volume Produksi Domestik



Sumber: Simulasi IMF (2025), diolah

peningkatan limbah dan polusi. Eksternalitas negatif dapat terjadi ketika industri mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak ekologis. Meski demikian, dampak tersebut juga berbentuk kurva U terbalik (Azam et al., 2024), di mana titik balik dapat terjadi lebih cepat dengan penguatan regulasi dan penggunaan teknologi bersih. *Ketiga*, ketergantungan terhadap energi berbasis fosil. Untuk itu, industrialisasi perlu dibarengi dengan pengembangan energi baru dan terbarukan. *Keempat*, teknologi yang berkembang dengan pesat. Adopsi teknologi otomatisasi dapat menurunkan

Grafik 6.2. Ilustrasi Simulasi Dampak Kebijakan Industri terhadap Biaya Produksi



Sumber: Simulasi IMF (2025), diolah

permintaan tenaga kerja. Selain itu, teknologi tinggi yang digunakan industri memerlukan tenaga kerja berkualitas yang belum tentu tersedia di domestik. Kemajuan teknologi juga menimbulkan ketergantungan pada negara lain apabila transfer teknologi tidak dapat dilakukan. *Kelima*, konsistensi kebijakan dan tata kelola yang kuat. Keberhasilan industrialisasi di Korea Selatan dan Tiongkok antara lain didukung dengan implementasi kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang serta tata kelola yang *govern* dan disiplin.

Oleh karena itu, kebijakan industrialisasi perlu disertai dengan pemenuhan sejumlah prasyarat untuk dapat mentransformasi ekonomi dengan baik. *Pertama*, kebijakan industrialisasi perlu didukung dengan desain kebijakan yang tepat. Dalam hal ini, kebijakan industri tidak bersifat *broad-based*, namun perlu diarahkan pada pemilihan sektor industri dengan potensi *spillover* dan *increasing returns to scale* yang tinggi. Selain itu, industrialisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, sehingga diperlukan peta strategi industrialisasi jangka panjang. *Kedua*, dukungan kebijakan struktural sebagai fondasi melalui peningkatan kualitas institusi, tata kelola yang kuat, dan integritas kebijakan, serta efektivitas koordinasi antarlembaga dan antar-otoritas. *Ketiga*, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi industri jangka panjang. *Keempat*, dukungan aktif sektor swasta sebagai pelaku industri utama dan sumber pembiayaan terbesar. *Kelima*, dukungan kebijakan pelengkap di bidang pendidikan, inovasi, dan infrastruktur. Tanpa pemenuhan prasyarat tersebut, kebijakan industri berisiko menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan beban fiskal yang sulit dikendalikan, sehingga manfaat pertumbuhan dan transformasi ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang dapat tereduksi.

Industrialisasi masih menjadi strategi utama pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bappenas (2024) menegaskan bahwa industrialisasi merupakan



“game changer” dan tahap transformasi wajib yang harus dilalui Indonesia untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sektor industri pengolahan juga terbukti menjadi mesin pertumbuhan yang paling efektif dibandingkan dengan sektor lainnya melalui efek ganda yang tinggi terhadap sektor yang lain. Industrialisasi juga dapat menciptakan lapangan kerja yang besar terutama dalam menghadapi bonus demografi ke depan dan menarik investasi baru. Industrialisasi meningkatkan nilai tambah produk sehingga mendukung perbaikan struktur ekonomi serta mengurangi ketergantungan impor terhadap bahan baku industri dan barang teknologi. Industrialisasi juga penting untuk transisi ke ekonomi modern dan energi hijau. Tanpa basis industri yang kuat, negara tidak dapat memproduksi panel surya, baterai kendaraan listrik (EV), dan turbin angin, serta tidak dapat mengembangkan teknologi dekarbonisasi. Selain itu, industrialisasi mengurangi ketergantungan pada ekonomi berbasis komoditas SDA yang rentan terhadap volatilitas harga global.

Keberhasilan industrialisasi dengan reformasi struktural sebagai fondasi mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dengan manfaat yang lebih merata sehingga mendukung terjaganya stabilitas nasional. Dampak dari kebijakan struktural dan industrialisasi sejalan dengan konsep Sumitronomics yang menekankan tiga pilar, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Industrialisasi menjadikan sektor industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang agresif sekaligus dapat mengurangi ketergantungan impor melalui diversifikasi produk yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan konsep Sumitronomics yang mengusung pertumbuhan ekonomi tinggi dan kemandirian nasional. Selanjutnya, industrialisasi dengan menyebarkan industri ke daerah memastikan manfaat industrialisasi dirasakan oleh seluruh masyarakat, sejalan dengan pilar pemerataan manfaat pembangunan Sumitronomics. Selanjutnya, Sumitronomics pada pilar ketiga mengimplikasikan bahwa industrialisasi hanya bisa berhasil dengan terjaganya stabilitas nasional.

Dari berbagai penjelasan tersebut, kebijakan hilirisasi merupakan bagian dari kebijakan industri yang mencerminkan konsep *dynamic comparative advantage*. Pada intinya, hilirisasi merupakan bagian dari industrialisasi yang mengubah bahan baku atau komoditas mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Kebijakan ini menekankan peran Pemerintah untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dari produk yang memiliki keunggulan kompetitif dengan lebih efisien secara berkelanjutan (Rodrik, 2004). Peningkatan efisiensi produksi dimungkinkan melalui penggunaan teknologi yang terus berkembang, investasi pada pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penggunaan sumber daya produksi lain yang lebih efisien (Redding, 1999).

6.2. Kebijakan Struktural Indonesia

Kebijakan struktural yang kuat menjadi fondasi keberhasilan industrialisasi yang berkelanjutan. IMF (2024) menjelaskan bahwa kebijakan struktural merupakan inti dari strategi jangka menengah negara-negara industri. Dalam hal ini, kebijakan struktural menjadi landasan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi distorsi pasar, memperkuat efisiensi industri, serta mendukung transformasi ekonomi jangka panjang. Studi Baquie et al. (2025) menegaskan bahwa kebijakan struktural memperkuat keterkaitan kebijakan industrialisasi dengan kinerja ekonomi. Peran kebijakan struktural juga ditekankan oleh Ciminelli et.al (2019) yang menunjukkan bahwa implementasi reformasi struktural secara simultan pada aspek regulasi seperti tarif perdagangan, keuangan domestik terkait pengaturan dan pengawasan, keuangan eksternal terkait keterbukaan aliran modal, dan ketenagakerjaan seperti perlindungan tenaga kerja, serta daya saing, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan dalam jangka menengah.



Kebijakan struktural sebagai fondasi kebijakan hilirisasi diarahkan pada perbaikan iklim investasi, persaingan usaha, konektivitas infrastruktur, dan kerja sama perdagangan dan investasi

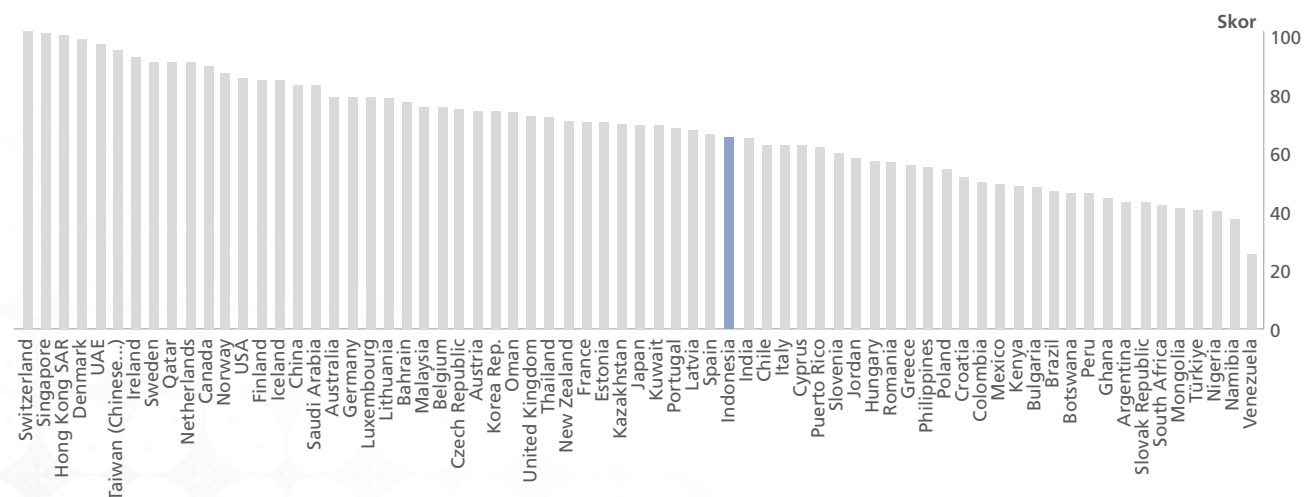
Kondisi iklim investasi dan daya saing Indonesia terus menunjukkan kemajuan, meskipun masih dapat ditingkatkan. *Business Ready (B-Ready) Index* Indonesia pada 2024 mencapai nilai 63 dari skala 100 (World Bank, 2024). Kinerja relatif baik tercatat pada indikator ketenagakerjaan, utilitas, dan lokasi usaha, sejalan dengan implementasi reformasi regulasi, perizinan berbasis risiko, serta penguatan infrastruktur dasar. Sementara itu, Berdasarkan rilis *IMD World Competitiveness Yearbook* (IMD, 2025), posisi daya saing Indonesia berada pada kelompok menengah global dengan peringkat 40 dari 69 negara (Grafik 6.3.). Posisi Indonesia lebih baik dari India, Italia, Filipina, Brasil, Afrika Selatan, dan Turki. Penguatan daya saing Indonesia terjadi pada pilar kinerja ekonomi, efisiensi bisnis, dan dinamika pasar domestik yang ditopang oleh stabilitas makroekonomi, reformasi perizinan berusaha, serta peningkatan realisasi investasi. Di sisi lain, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia juga mencatat perbaikan dari angka 34 pada tahun 2023 menjadi 37 pada

tahun 2024 yang mencerminkan peningkatan persepsi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan mendukung perbaikan iklim investasi.

Kebijakan struktural diarahkan pada perbaikan iklim investasi, persaingan usaha yang sehat, konektivitas infrastruktur, serta kebijakan perdagangan dan investasi untuk menopang keberhasilan industrialisasi. Studi Deléchat et al. (2024) menekankan pentingnya kebijakan struktural dalam menunjang keberhasilan kebijakan industrialisasi. Lebih lanjut, kebijakan struktural juga ditempuh untuk mengatasi berbagai hambatan pertumbuhan dan produktivitas ekonomi seperti halnya kebijakan industrialisasi. Bedanya, kebijakan struktural ditujukan bagi seluruh sektor-sektor ekonomi, sementara kebijakan industrialisasi lebih diarahkan pada sektor-sektor unggulan.

Perbaikan iklim investasi nasional melalui berbagai terobosan kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kepastian usaha dan persaingan usaha yang sehat. Upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah melalui harmonisasi dan simplifikasi regulasi lintas sektor, antara lain dengan merevisi puluhan undang-undang melalui Undang-Undang Cipta Kerja guna meningkatkan efisiensi perizinan. Pemerintah juga menerapkan pendekatan perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang menyederhanakan proses perizinan sesuai

Grafik 6.3. Peringkat Daya Saing Dunia



Sumber: IMD WCY (2025)



tingkat risiko kegiatan usaha, sehingga pelaku usaha berisiko rendah dapat memulai usaha dengan lebih cepat, sementara usaha berisiko lebih tinggi tetap diawasi secara proporsional. Di sisi kelembagaan, kewenangan perizinan investasi dipusatkan melalui Kementerian Investasi/BKPM dan dioperasikan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi lintas sektor, didukung penerapan *service level agreement* (SLA) dan mekanisme fiktif positif perizinan. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif fiskal melalui penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Implementasi berbagai kebijakan perbaikan iklim investasi tersebut sejalan dengan peta jalan perbaikan kemudahan berusaha yang telah disusun pada tahun 2021. Keseluruhan kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, transparan, dan berdaya saing guna mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Reformasi struktural di bidang investasi untuk mendukung perbaikan iklim investasi dilakukan melalui penataan pengaturan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk meningkatkan kepastian berusaha sekaligus menjaga kualitas investasi. Sejalan dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 tahun 2025, pengaturan PMA antara lain dilakukan melalui penetapan minimum nilai investasi PMA sebesar Rp10 miliar. Di sisi lain, ketentuan modal disetor dan ditempatkan minimum sebesar Rp2,5 miliar ditetapkan untuk memperkuat komitmen investor, disertai pengaturan yang lebih fleksibel terkait pemanfaatan dana bagi kebutuhan operasional usaha. Penataan ini juga memberikan perlakuan khusus bagi sektor-sektor tertentu, seperti properti, akomodasi, dan sektor berbasis SDA. Secara keseluruhan, pengaturan PMA tersebut mencerminkan arah reformasi struktural Pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih transparan, proporsional, dan berorientasi pada investasi produktif, sejalan dengan upaya simplifikasi regulasi, perizinan berbasis risiko, serta penguatan tata kelola guna mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan.

Selanjutnya, kebijakan struktural melalui persaingan usaha yang sehat dapat menciptakan efisiensi, mendorong inovasi, menurunkan biaya ekonomi, dan memperbaiki distribusi sumber daya. Pemerintah bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan modernisasi kebijakan persaingan untuk memperkuat daya saing nasional. Hal ini dilakukan antara lain melalui pembaruan regulasi persaingan yang selaras dengan ekonomi digital, harmonisasi kebijakan lintas sektor, penguatan kapasitas institusi penegak persaingan, dan integrasi teknologi dalam pemantauan dan penegakan hukum persaingan.

Reformasi struktural melalui penguatan konektivitas dan keandalan infrastruktur, baik fisik maupun digital, penting dalam menunjang transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing nasional. Konektivitas fisik penting untuk mempercepat akses layanan publik dan integrasi ekonomi antarwilayah. Dalam hal ini, Pemerintah berkomitmen untuk membangun konektivitas fisik yang modern, efisien, dan terjangkau. Kebijakan konektivitas infrastruktur fisik mencakup integrasi moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta, pengurangan disparitas biaya logistik antara wilayah barat dan timur, serta peningkatan *logistics performance index* (LPI) nasional. Upaya peningkatan konektivitas dan kawasan juga menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, Pemerintah juga berupaya menyediakan infrastruktur fisik yang merata hingga daerah terpencil sesuai dengan konsep Sumitronomics yang menekankan pemerataan manfaat pembangunan. Dari sisi konektivitas infrastruktur digital, Pemerintah melakukan pemerataan internet melalui pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) dan jaringan serat optik. Pemerintah juga telah menyusun peta jalan infrastruktur digital nasional 2025 sebagai panduan pembangunan infrastruktur digital ke depan. Seluruh kebijakan tersebut perlu didukung dengan penguatan tata kelola infrastruktur yang *govern*.



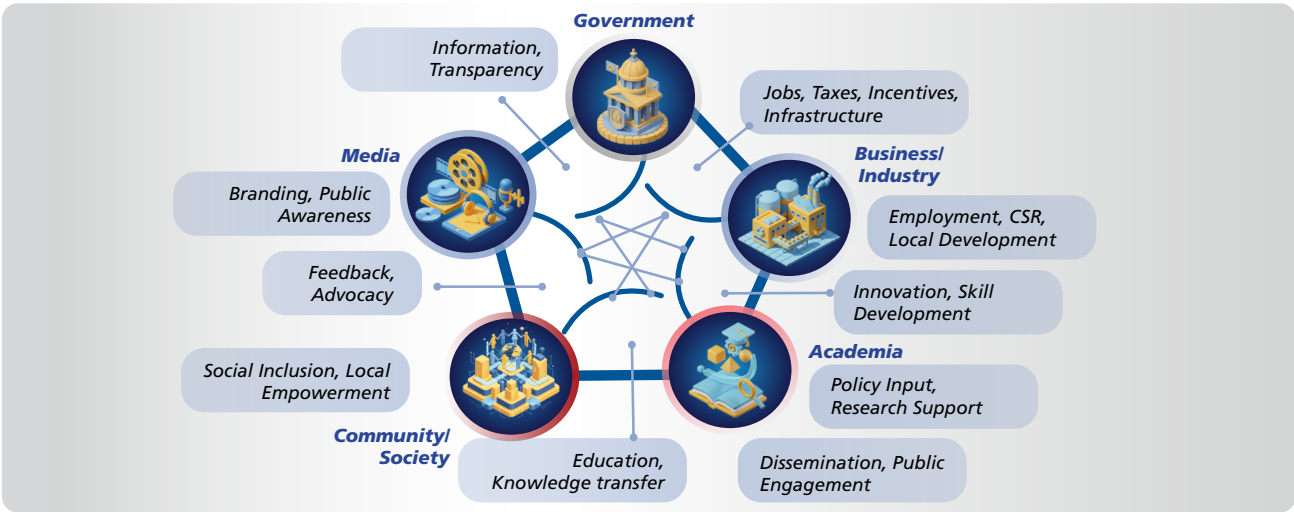
Pemerintah memperkuat kebijakan struktural melalui penyediaan paket insentif fiskal yang lebih kompetitif, terarah, dan transparan guna meningkatkan daya tarik investasi serta mendorong transformasi sektor riil. Insentif tersebut diproses secara terintegrasi melalui satu pintu di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, mencakup berbagai skema utama seperti *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan bea masuk, dan *super tax deduction*. Melalui skema *tax holiday*, Pemerintah memberikan pengurangan PPh Badan hingga 100% untuk investasi berskala besar dan industri pionir dalam jangka waktu tertentu, serta skema *mini tax holiday* dengan pengurangan PPh Badan yang lebih terbatas untuk investasi menengah. *Tax allowance* diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan kena pajak, percepatan penyusutan dan amortisasi, penurunan tarif pajak atas dividen, serta perpanjangan periode kompensasi kerugian, khususnya untuk sektor dan wilayah prioritas. Di sisi perdagangan dan industri, pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang, dan bahan baku diberikan untuk menurunkan biaya investasi awal dan mendukung peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, *super tax deduction* disediakan untuk mendorong kegiatan strategis seperti pendidikan vokasi, penelitian dan pengembangan (R&D), serta investasi pada industri padat karya. Secara keseluruhan, kebijakan insentif ini dirancang sebagai bagian dari reformasi struktural untuk menurunkan biaya berusaha, meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi, dan menjaga persaingan usaha yang sehat serta memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi yang kokoh bagi transformasi ekonomi. Pada jangka menengah 2025-2029, Pemerintah melalui Prioritas Nasional (PN) 4 berkomitmen untuk memperkuat pembangunan SDM Indonesia. Kebijakan penguatan SDM diarahkan antara lain melalui percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penguatan sistem tata kelola pendidikan, penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology,*

Engineering, Art, and Mathematic (STEAM), serta penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi. Di samping itu, Pemerintah juga akan melakukan penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta ekosistem ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan mampu mendorong kualitas dan produktivitas tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan.

Penguatan kebijakan reformasi struktural juga dilakukan melalui peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi baik di dalam negeri maupun internasional. Pemerintah mendorong pendekatan kolaboratif pentaheliks yang mengintegrasikan peran Pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media untuk mendorong realisasi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan (Gambar 6.1.). Melalui penetapan arah kebijakan dan strategi diplomasi investasi, Pemerintah berperan memastikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif guna menarik investasi asing dan domestik. Di sisi dunia usaha, kolaborasi internasional diarahkan untuk mendorong hilirisasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja sebagai hasil konkret dari perjanjian dan kemitraan investasi lintas negara. Akademisi dilibatkan dalam penyediaan masukan berbasis riset dan penguatan kapasitas SDM, sementara masyarakat berperan memastikan investasi dapat memberikan dampak yang inklusif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan lokal. Peran media turut diperkuat untuk meningkatkan transparansi, komunikasi publik, dan citra positif Indonesia sebagai tujuan investasi yang berdaya saing. Pendekatan pentaheliks tersebut dilengkapi dengan strategi fasilitasi yang mencakup penghubung antara inovasi akademik dan kebutuhan investor, mekanisme *right to match*, penyelenggaraan forum inventor secara berkala, serta optimalisasi forum kerja sama internasional. Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam membangun ekosistem kerja sama internasional yang terkoordinasi, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas investasi sebagai bagian dari agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi nasional.

Gambar 6.1. Pentaheliks Model untuk Memperkuat Kerja Sama Internasional



Sumber: BKPM

Program Pemerintah melalui PSN dapat dimaknai sebagai kebijakan struktural untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang. Peningkatan produktivitas ditempuh melalui 79 PSN pembangunan infrastruktur konektivitas dan pengembangan kawasan ekonomi. Sementara itu, sebanyak 142 PSN ditujukan untuk memperkuat struktur perekonomian melalui peningkatan akumulasi modal yang terbagi menjadi 90 proyek terkait penyediaan perumahan, sumber daya air, energi, dan pangan; 21 proyek terkait dengan program energi dan pengembangan lahan sawah rawa; dan 52 PSN terkait dengan peningkatan usaha, hilirisasi, dan industrialisasi. Dari sisi tenaga kerja, Pemerintah telah merencanakan 7 proyek yang berfokus pada penguatan SDM. Dari tujuh proyek tersebut, empat di antaranya merupakan arahan Presiden, yaitu program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, digitalisasi pendidikan, dan kartu kesejahteraan.

6.3. Kebijakan Industrialisasi Indonesia

6.3.1. Perkembangan Kebijakan Industrialisasi Global

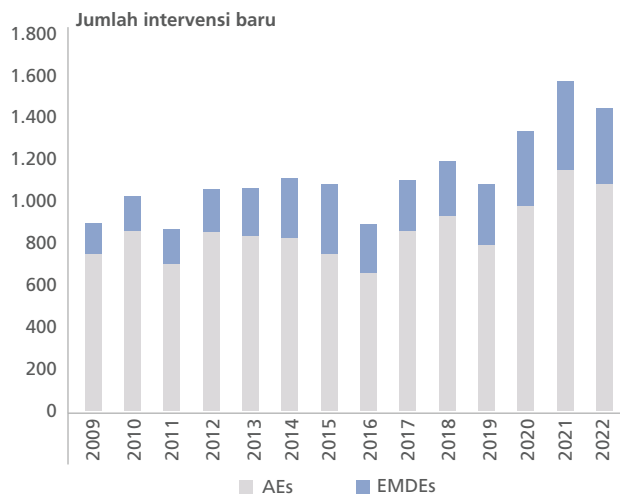
Sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global, kebijakan industrialisasi kembali ditempuh oleh banyak negara. Perekonomian dunia ke depan akan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perlambatan

pertumbuhan ekonomi dengan fragmentasi antarnegara yang melebar. Perlambatan tersebut dipicu oleh ketidakpastian kondisi global yang tinggi seiring dengan implementasi kebijakan tarif sepihak Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya ketegangan geopolitik. Kebijakan tarif AS berdampak pada penurunan volume perdagangan dunia dan makin memperparah hambatan rantai pasok dunia. Sementara itu, proses disinflasi dunia diperkirakan tertahan akibat dampak implementasi tarif AS serta harga komoditas nonmigas yang diperkirakan masih tetap tinggi. Kondisi ini akan membatasi ruang gerak penurunan suku bunga kebijakan moneter untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi domestiknya. Karenanya, dorongan pertumbuhan ekonomi akan banyak tergantung dari implementasi kebijakan reformasi struktural dan industri untuk menggerakkan sektor riil. Kondisi ini tecermin dari peningkatan intervensi baru kebijakan industri (*industrial policy*, IP), terutama pascapandemi COVID-19 (Grafik 6.4.).

Jumlah negara yang menerapkan kebijakan industrialisasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi terus bertambah, terutama terlihat di negara-negara maju, termasuk AS, Uni Eropa, dan Kanada, serta sejumlah negara berkembang seperti Tiongkok. Langkah kebijakan industrialisasi semakin banyak ditempuh oleh



Grafik 6.4. Evolusi Global Kebijakan Industri

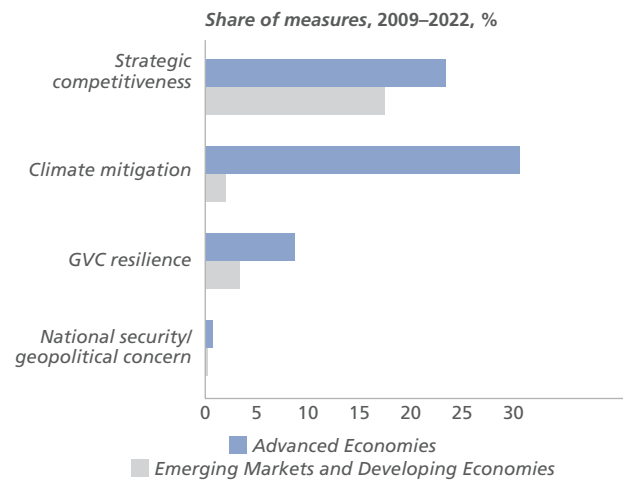


Sumber: WEO, IMF, Oktober 2025, diolah

berbagai negara sejak pandemi COVID-19. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan pembangunan yang sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar menuju peran negara yang lebih aktif dalam mengarahkan struktur ekonomi jangka menengah dan panjang. Kebijakan industrialisasi modern tidak lagi terbatas pada proteksi perdagangan atau substitusi impor, tetapi juga mencakup insentif fiskal yang terarah, dukungan pembiayaan jangka panjang, kebijakan pengadaan Pemerintah, serta fasilitasi riset dan pengembangan.

Motivasi untuk menerapkan kebijakan industrialisasi terutama untuk meningkatkan daya saing produk negara yang bersangkutan di pasar global melalui instrumen subsidi dan bantuan langsung. Pertimbangan untuk memperkuat daya saing ini banyak ditemukan baik di negara maju maupun di *emerging market and developing economies* (EMDEs). Sementara pertimbangan lain, misalnya untuk mitigasi iklim dan penguatan ketahanan rantai nilai global, lebih banyak ditemukan di negara maju (Grafik 6.5.). Berdasarkan sektornya, kebijakan industrial di negara maju lebih banyak diarahkan pada sektor manufaktur yang berteknologi tinggi, sektor komoditas, energi, dan pangan, serta sektor jasa-jasa. Di negara berkembang,

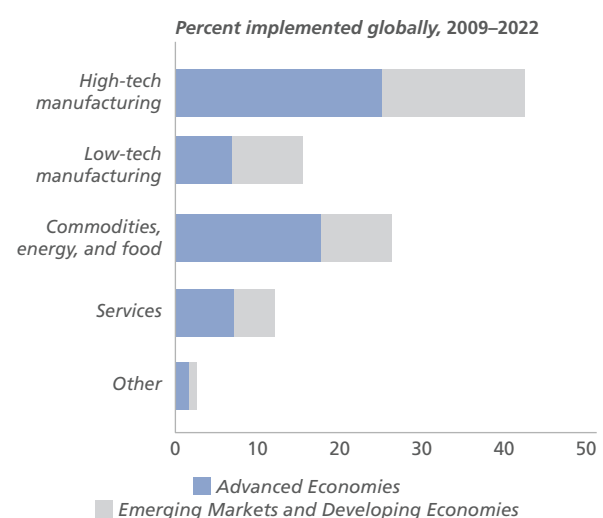
Grafik 6.5. Motivasi Kebijakan Industrialisasi Global



Sumber: WEO IMF, Oktober 2025, diolah

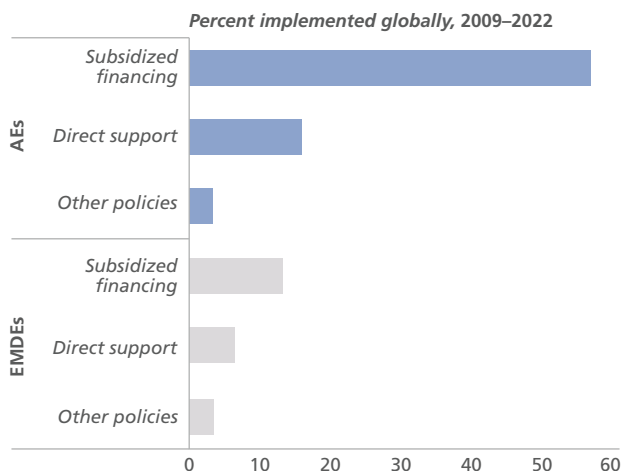
sektor prioritas kebijakan industrialisasi lebih bervariasi, mulai dari sektor manufaktur berteknologi tinggi, sektor komoditas, energi, dan pangan, hingga sektor jasa-jasa, tergantung pada kesiapan kemampuan teknologi dan ketersediaan SDA yang dimiliki (Grafik 6.6.). Berdasarkan instrumennya, IMF (2025) mencatat bahwa sepanjang periode 2009-2022, instrumen kebijakan industri berupa subsidi pembiayaan (*subsidized financing*) dan bantuan langsung (*direct support*) mencakup lebih dari 80% intervensi kebijakan industri, baik di negara maju maupun negara berkembang (Grafik 6.7.).

Grafik 6.6. Sektor Prioritas Kebijakan Industrialisasi Global



Sumber: WEO IMF, Oktober 2025, diolah

Grafik 6.7. Intervensi Kebijakan Industrialisasi Global Berdasarkan Instrumen



Sumber: WEO IMF, Oktober 2025, diolah

Bagi Indonesia dan kawasan ASEAN, dinamika kebijakan industrialisasi global membuka peluang untuk memperkuat posisi dalam rantai nilai global. Relokasi produksi dan investasi lintas negara yang meningkat akibat fragmentasi geoekonomi dan strategi *friend-shoring* menciptakan ruang untuk memperkuat basis manufaktur domestik dan menarik investasi di sektor teknologi hijau serta kendaraan listrik. Namun demikian, peluang tersebut juga diiringi oleh risiko meningkatnya volatilitas arus modal, tekanan eksternal terhadap nilai tukar, dan potensi pelebaran defisit transaksi berjalan jika kebijakan industrialisasi tidak terkoordinasi dan terimplementasi dengan baik.

Selanjutnya, keberhasilan penerapan kebijakan industrialisasi di berbagai negara tidak sama, dipengaruhi oleh karakteristik negara dan model industrialisasi yang digunakan. Kebijakan industrialisasi di Korea Selatan berhasil karena didukung oleh visi jangka panjang yang jelas, koordinasi erat antara Pemerintah dan sektor swasta, serta fokus pada pengembangan kapabilitas teknologi dan sumber daya manusia. Tiongkok menunjukkan peran perencanaan jangka panjang dan dukungan negara berskala besar dalam mempercepat difusi teknologi, meski menimbulkan tantangan berupa risiko kelebihan kapasitas dan ketegangan perdagangan. Sebaliknya, pengalaman implementasi kebijakan industrialisasi di Brasil memberikan pelajaran bahwa proteksionisme tanpa pengawasan yang

kuat dan disiplin kinerja berisiko menciptakan ketergantungan subsidi, distorsi, dan pelemahan daya saing. Implementasi kebijakan industrialisasi di sejumlah negara tersebut dapat dijadikan pembelajaran dalam menentukan desain kebijakan industri di Indonesia.

Pengalaman Korea Selatan menggambarkan kebijakan industrialisasi dengan desain kebijakan yang tepat dapat mendorong transformasi sektor riil. Sejak 1970-an, Pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan industrialisasi dalam skala besar untuk mendorong transformasi struktural pada sektor-sektor strategis. Kebijakan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan teknologi pada masanya. Model kebijakan industrialisasi Korea Selatan berupa kemitraan antara negara dengan konglomerasi swasta (*chaebol*), di mana *chaebol* berperan sebagai *lead firms* dari visi jangka panjang Pemerintah. Pemerintah berperan, antara lain melalui perencanaan industri dan pembiayaan yang terarah, dukungan insentif fiskal berbasis kinerja dengan target yang jelas, dan mendorong produktivitas berorientasi ekspor. Selain itu, Korea Selatan melakukan proteksi pasar domestik sebagai inkubator industri awal dengan tujuan utama pasar ekspor dan proteksi selektif pada industri strategis. Industrialisasi di Korea Selatan juga didukung oleh pembiayaan yang terarah ke sektor prioritas dengan koordinasi erat antara Pemerintah dengan otoritas moneter.

Kebijakan industrialisasi di Korea Selatan didukung dengan kebijakan struktural yang kuat. Pemerintah Korea Selatan mengimplementasikan kebijakan industrialisasi secara konsisten dalam jangka panjang dan melakukan evaluasi ketat dengan memastikan penghentian dukungan subsidi dan insentif bagi sektor yang tidak produktif. Sebagai contoh, Pemerintah memberikan dukungan kepada lebih dari satu perusahaan di sektor otomotif, namun pada perkembangnya, perusahaan Hyundai yang menjadi dominan. Selain itu, Korea Selatan juga menyediakan pendanaan yang besar untuk kegiatan R&D dengan nilai >5% PDB. Kegiatan R&D Korea Selatan berfungsi sebagai alat untuk mengejar ketertinggalan teknologi melalui proses *learning by doing* dan *reverse*



engineering. Selain itu, keberhasilan kebijakan industrialisasi Korea Selatan juga didukung oleh tata kelola yang kuat dan kebijakan pelengkap seperti kampanye antikorupsi, investasi kawasan industri, fasilitas impor barang modal, penguatan pendidikan tenaga kerja terampil, serta reformasi agraria. Industrialisasi di Korea Selatan berhasil mendorong peningkatan produktivitas dan ekspor secara berkelanjutan, menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu contoh paling sukses dalam penerapan industrialisasi di negara berkembang.

Tiongkok menerapkan kebijakan industrialisasi dengan skala dan intensitas yang jauh lebih besar melalui perencanaan jangka panjang dan dukungan negara yang kuat. Sejak awal reformasi ekonomi, Pemerintah Tiongkok mengintegrasikan strategi industrialisasi dengan rencana pembangunan nasional, memprioritaskan sektor manufaktur, dan teknologi strategis seperti kendaraan listrik, panel surya, dan semikonduktor. Kebijakan ini mencakup investasi yang masif, insentif fiskal, dan pembiayaan murah, disertai dengan penguatan kapasitas produksi melalui integrasi bertahap dengan pasar global. Orientasi ekspor dan keterlibatan aktif dalam rantai nilai internasional mempercepat transformasi struktural, menjadikan Tiongkok sebagai pusat manufaktur dunia. Pemerintah juga membangun ekosistem pendukung melalui pengembangan kawasan industri, infrastruktur logistik, dan kebijakan pengadaan publik untuk mendorong permintaan domestik Tiongkok. Dari sisi R&D, Tiongkok membangun ekosistem R&D yang terintegrasi antara akademik dengan industri, serta melakukan alih teknologi yang agresif. Industrialisasi di Tiongkok juga didukung oleh ekosistem pembiayaan Pemerintah dan lembaga keuangan yang saling mendukung serta skema pembiayaan yang inovatif. Pemerintah Tiongkok juga melakukan proteksi terhadap pasar domestik dibarengi dengan perluasan penyediaan bahan baku dan pemasaran secara global, serta proteksi ekspor teknologi. Pengelolaan risiko fiskal, disiplin pasar, dan keberlanjutan menjadi perhatian agar kebijakan industrialisasi Tiongkok terhindar dari ketidakseimbangan struktural. Meskipun

demikian, strategi ini berhasil meningkatkan daya saing teknologi dan memperkuat posisi Tiongkok dalam rantai pasok global, sekaligus memberikan pelajaran tentang pentingnya perencanaan jangka panjang dan integrasi kebijakan industri dengan agenda pembangunan nasional.

Sebaliknya, kegagalan implementasi kebijakan industrial di Brasil memberikan pelajaran mengenai keterbatasan kebijakan industri berbasis substitusi impor. Kebijakan industrialisasi Brasil mengandalkan proteksi tinggi terhadap industri domestik dan badan usaha milik negara sebagai instrumen utama, dengan tujuan mengurangi ketergantungan impor dan mendorong pertumbuhan manufaktur. Pada tahap awal, strategi ini sempat meningkatkan kapasitas produksi, tetapi orientasi pasar domestik yang sempit membatasi skala ekonomi dan integrasi dengan pasar global. Ketidadaan mekanisme evaluasi berbasis kinerja dan disiplin kebijakan menyebabkan dukungan negara terus diberikan meskipun produktivitas rendah, sehingga menyebabkan ketergantungan pada subsidi fiskal dan meningkatkan beban anggaran. Di sisi lain, investasi R&D swasta relatif rendah dengan riset manufaktur yang hanya sukses di beberapa sektor dan kurang terintegrasi dengan kebutuhan pasar. Di samping itu, kebijakan struktural berupa tata kelola dan pengawasan kebijakan yang lemah menimbulkan distorsi harga dan salah alokasi sumber daya. Dalam jangka panjang, strategi ini gagal memperkuat daya saing dan ketahanan eksternal, serta berkontribusi pada krisis utang eksternal pada dekade 1980-an. Pengalaman Brasil ini menegaskan bahwa kebijakan industrialisasi yang terlalu proteksionis tanpa insentif yang berbasis kinerja dan mekanisme pengaman berisiko menciptakan ketergantungan subsidi dan melemahkan daya saing struktural (Tabel 6.1.).

6.3.2. Perkembangan Kebijakan Industrialisasi Indonesia

Kebijakan industrialisasi Indonesia terus berevolusi dari substitusi impor menuju peningkatan nilai tambah dan penguatan basis manufaktur. Secara historis, kebijakan hilirisasi di Indonesia berkembang secara bertahap

Tabel 6.1. Kebijakan Industrial Korea Selatan, Tiongkok, dan Brasil

Aspek	Korea Selatan	Tiongkok	Brasil
Strategi Utama dalam Industrialisasi	Industrialisasi berbasis ekspor	<i>Hybrid</i> : substitusi impor pada tahap awal, diikuti orientasi ekspor dan integrasi rantai nilai global	Industrialisasi untuk mensubstitusi produk impor
Target Pasar	Fokus pada pasar global untuk mendorong skala ekonomis	Fokus pada pasar domestik yang sangat besar dan pasar global	Fokus pada pasar domestik, yang relatif terbatas
Struktur Kepemilikan Badan Usaha	Didominasi sektor swasta, dukungan Pemerintah diberikan pada perusahaan berbasis ekspor	Campuran badan usaha milik negara, semi-negara, dan perusahaan swasta besar, namun peran negara sangat dominan	Bergantung pada badan usaha milik Pemerintah dan <i>Multinational Companies</i>
Learning & Discipline	Mendorong penerapan, penguasaan, dan pengembangan kembali teknologi asing	Agresif dalam menyerap, meniru, dan meng- <i>upgrade</i> teknologi asing	Penyerapan dan pengembangan kembali teknologi terbatas
Kualitas Penerapan Industrial Policy	Tata kelola kebijakan industrialisasi yang <i>govern</i> dan disiplin	Tata kelola kebijakan industrialisasi yang <i>govern</i> meski disiplin tidak sekeras Korea Selatan, namun implemementasi kebijakan sangat cepat	Tata kelola kebijakan industrialisasi yang tidak <i>govern</i> , menyebabkan dampak positif kebijakan yang tidak optimal
Outcome	Berhasil memanfaatkan <i>global value chain</i> dan menjadi <i>high income country</i>	Berhasil melakukan <i>industrial upgrading</i> dan menjadi <i>hub</i> manufaktur dunia, namun masih di zona <i>upper-middle income country</i>	Masih terjebak dalam <i>middle income trap</i>

Sumber: WEO IMF, Oktober 2025, diolah

dan mengalami perubahan orientasi seiring dengan dinamika ekonomi nasional dan global. Pada periode awal pascakemerdekaan hingga Orde Baru, kebijakan industri Indonesia masih didominasi oleh industrialisasi substitusi impor, sementara ekspor berbasis sumber daya alam lebih berperan sebagai penyedia bahan baku dan sumber penerimaan devisa, dengan hilirisasi yang relatif terbatas. Memasuki era 1980-an hingga awal 2000-an, orientasi kebijakan bergeser ke arah ekspor berbasis komoditas primer, sejalan dengan pembukaan perdagangan dan investasi, namun ketergantungan pada ekspor bahan mentah semakin menguat. Titik balik kebijakan hilirisasi terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, yang secara eksplisit mewajibkan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Sejak saat itu, hilirisasi, khususnya di sektor pertambangan, diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki *terms of trade*, dan menarik investasi industri pengolahan. Perkembangan berikutnya ditandai dengan pelarangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam perkembangannya,

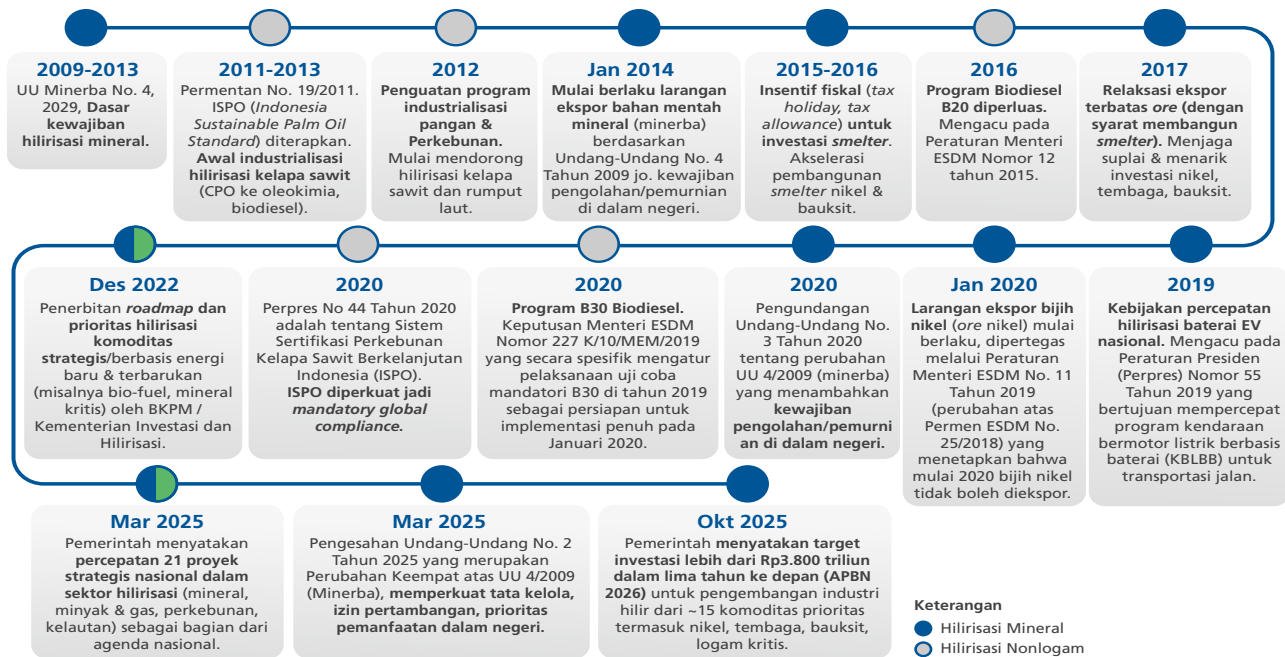
kebijakan hilirisasi berevolusi menjadi bagian dari agenda transformasi struktural ekonomi, dengan cakupan yang diperluas tidak hanya pada mineral dan batubara, tetapi juga sektor nonpertambangan seperti pertanian dan pangan, serta dikaitkan dengan penguatan industri manufaktur, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan ketahanan eksternal (Gambar 6.2.).

Industrialisasi, melalui penguatan hilirisasi, tidak hanya mendorong peningkatan nilai tambah ekspor tetapi juga memperkuat daya tarik investasi pada sektor industri pengolahan. Dalam satu dekade terakhir, pangsa produk hasil pengolahan dalam struktur ekspor nasional menunjukkan tren meningkat, dari 67,14% pada tahun 2014 menjadi 71,80% pada 2024 (Grafik 6.8.). Peningkatan tersebut mencerminkan semakin kuatnya kontribusi sektor manufaktur terhadap kinerja ekspor sekaligus

Industrialisasi Indonesia mendorong peningkatan nilai tambah produk ekspor dan memperkuat daya tarik investasi sektor industri pengolahan



Gambar 6.2. Perkembangan Hilirisasi Indonesia

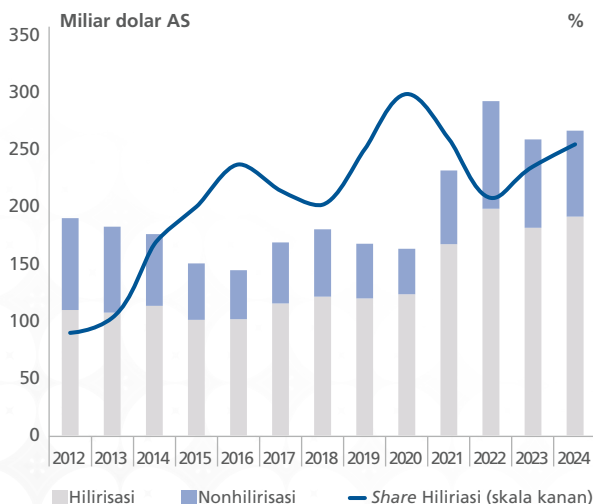


Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

mengindikasikan dampak positif transformasi struktural ekonomi menuju peningkatan daya saing dan ketahanan ekspor. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kebijakan hilirisasi juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan investasi nasional. Realisasi investasi terkait hilirisasi pada periode 2024 hingga triwulan III-2025 mencapai Rp839,2 triliun atau sekitar 26,7% dari total realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), jauh meningkat

dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yakni Rp375,4 triliun atau 26,5% dari total realisasi PMDN dan PMA (Tabel 6.2.). Capaian ini menunjukkan peningkatan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi industri pengolahan dan manufaktur bernilai tambah, sekaligus menegaskan peran hilirisasi sebagai katalis dalam menggeser pola investasi dari sektor ekstraktif menuju sektor produktif berbasis pengolahan dan mempercepat transformasi struktur ekonomi nasional.

Grafik 6.8. Kontribusi Industrialisasi dalam Ekspor Nasional



Sumber: WITS

Hilirisasi masih dapat ditingkatkan sebagai penguatan pondasi transformasi ekonomi ke depan. Beberapa pelajaran dapat dipetik dari proses hilirisasi yang telah dilakukan untuk pengembangan selanjutnya. *Pertama*, hilirisasi terbukti meningkatkan kinerja ekspor, khususnya

Tabel 6.2. Kontribusi Industrialisasi dalam Investasi Nasional

Sektor	Investasi (triliun Rupiah)	
	2023	2024 s.d. triwulan III 2025
Sektor Hilirisasi	375,4 (26,5%)	839,2 (26,7%)
Sektor Nonhilirisasi	1.043,5 (73,5%)	2.309,3 (73,3%)
Total	1.418,9 (100%)	3.148,5 (100%)

Sumber: BKPM, diolah

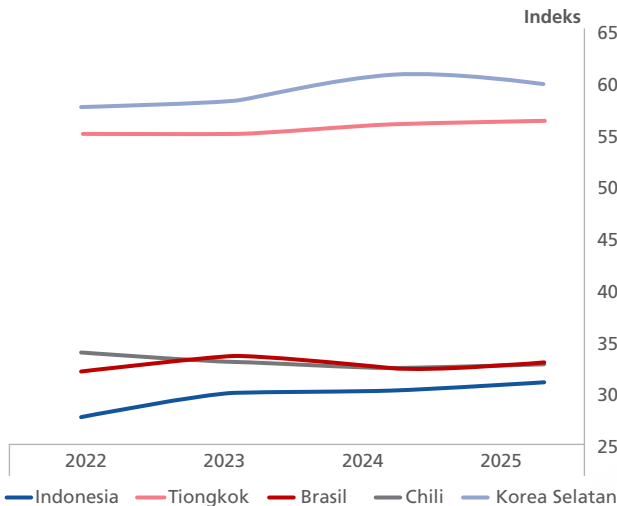
industri logam dasar, namun masih terbatas pada industri *smelter* yang menghasilkan produk antara. Selain itu, impor sejumlah produk turunan, terutama dari timah dan tembaga, juga masih tinggi yang mengindikasikan hilirisasi belum dapat mensubstitusi produk impor. *Kedua*, hilirisasi juga telah meningkatkan investasi nasional, termasuk PMA, namun disertai dengan risiko terhambatnya rantai nilai domestik. Produk hilirisasi yang berorientasi ekspor cenderung dikirim ke negara asal investor sehingga lebih rentan terhadap *shock* eksternal. *Ketiga*, hilirisasi juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, namun belum disertai dengan peningkatan kualitas SDM dan R&D yang optimal. Tenaga kerja di industri pengolahan masih didominasi oleh lulusan SMA ke bawah. Sementara itu, inovasi di Indonesia masih di bawah negara lain sebagaimana tecermin pada *global innovation index* (Grafik 6.9.).

6.3.3. Penguatan Kebijakan Industrialisasi
Indonesia

Pencapaian visi Indonesia Emas memerlukan strategi transformasi sektor riil melalui reformasi struktural dan kebijakan industrialisasi.

Pencapaian visi tersebut dilakukan dalam empat tahapan transformasi ekonomi di mana tahap pertama merupakan tahapan penguatan transformasi yang dilakukan pada periode 2025-2029 (Gambar 6.3.). Pada tahap pertama ini, penguatan transformasi

Grafik 6.9. *Global Innovation Index*



Sumber: World Intellectual Property Organization, diolah

Arah kebijakan industrialisasi melalui
hilirisasi berfokus pada komoditas
SDA unggulan dan penguatan
industri manufaktur prioritas

dilakuan melalui hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, Pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan tahap pertama transformasi ekonomi tersebut. RPJMN 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional yang di antaranya adalah Prioritas Nasional Kelima, yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Prioritas Nasional (PN) 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Untuk itu, kebijakan industrialisasi jangka menengah diarahkan untuk (i) pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi serta berorientasi ekspor; (ii) pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru; (iii) optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan penguatan sistem logistik nasional; (iv) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; (v) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global; dan (vi) optimalisasi investasi strategis nasional.

Arah kebijakan hilirisasi industri berfokus pada hilirisasi komoditas SDA unggulan dan penguatan industri manufaktur prioritas. Komoditas unggulan yang diprioritaskan harus memberikan kontribusi besar terhadap PDB. Selain itu, komoditas tersebut juga harus memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri, peluang investasi,



Gambar 6.3. Tahapan Transformasi Ekonomi

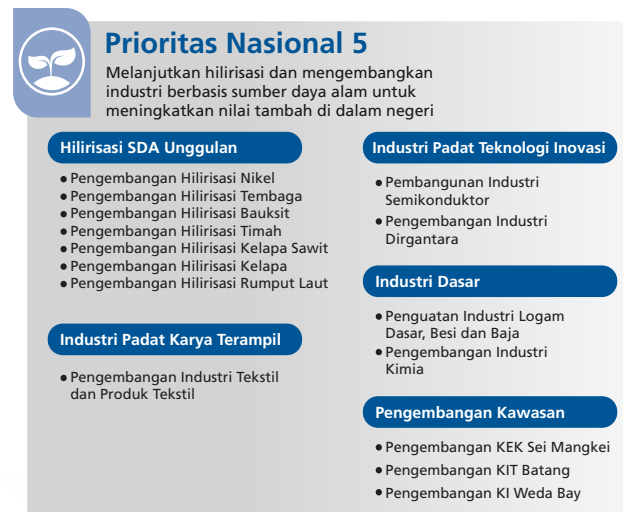


Sumber: Bappenas (2024)

ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan. Hilirisasi SDA tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global (*global value chain*, GVC), mengurangi ketergantungan impor, serta mendorong pemanfaatan SDA secara lebih optimal. Dalam kaitan ini, komoditas SDA unggulan yang akan diprioritaskan pada jangka menengah adalah nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut (Gambar 6.4.). Di samping komoditas tersebut, logam tanah jarang (*rare earth*) juga dapat menjadi salah satu fokus komoditas hilirisasi. Pemilihan ini didukung permintaan dunia yang meningkat pesat, antara lain untuk kendaraan listrik, baterai, perangkat elektronik, hingga sistem pertahanan modern, dan cadangan bijih logam tanah jarang yang melimpah. Meski demikian, pengelolaan logam tanah jarang masih ditutup untuk swasta dan dilakukan sepenuhnya oleh Badan Industri Mineral. Industri padat teknologi inovasi akan difokuskan pada pengembangan industri semikonduktor dan industri dirgantara, sementara industri dasar pada penguatan industri

logam dasar, besi dan baja, serta pengembangan industri kimia. Seluruh arah kebijakan tersebut diperkuat melalui pengembangan aglomerasi industri di KI dan KEK prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru pengembangan kawasan industri strategis, termasuk KEK Sei Mangkei, KIT Batang, dan KI Weda Bay.

Gambar 6.4. Komoditas Hilirisasi SDA Prioritas dalam RPJMN

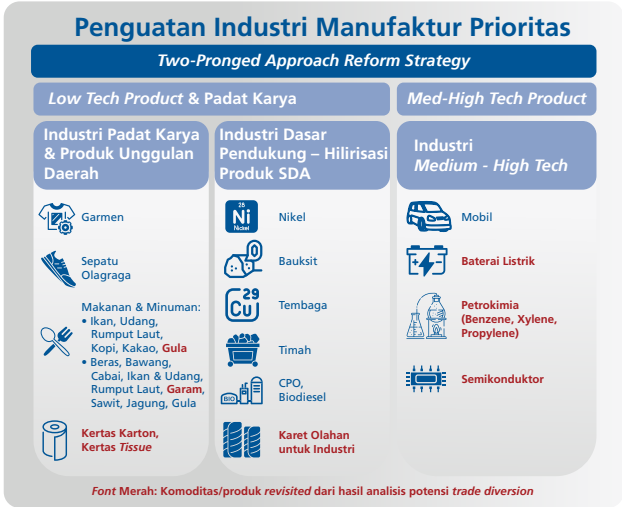


Sumber: RPJMN (Bappenas)

Penguatan industri manufaktur prioritas dapat ditempuh melalui kerangka *two-pronged approach reform strategy*, dengan arah kebijakan fokus pada dua strategi utama, yaitu industri berteknologi menengah-tinggi dan industri berteknologi rendah dan padat karya. Strategi industri dengan teknologi medium-tinggi difokuskan pada industri mobil, baterai listrik, petrokimia (*benzena, xilena, propilena*), dan semikonduktur (Gambar 6.5.). Strategi industri pendukung dengan teknologi rendah difokuskan pada produk SDA seperti nikel, bauksit, tembaga, timah, CPO, dan karet olahan untuk industri. Strategi industri padat karya dan produk unggulan daerah difokuskan pada garmen, sepatu olahraga, serta sejumlah produk perkebunan, pertanian, dan perikanan. Pemilihan strategi tersebut didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan adopsi teknologi, pembentukan mata rantai hilirisasi dan industrialisasi, serta ketersediaan eksplorasi dari komoditas SDA tersebut. Secara keseluruhan, penguatan industri manufaktur prioritas melalui pendekatan ganda ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional, memperkuat ketahanan struktur ekonomi, serta menegaskan peran sektor manufaktur sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

Hilirisasi nikel menjadi salah satu contoh pengembangan rantai nilai yang mendorong pergeseran ekspor dari bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 dan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan telah mendorong pergeseran ekspor dari bahan mentah menuju produk olahan bernilai tambah tinggi, seperti feronikel, *nickel pig iron* (NPI), hingga produk antara untuk industri baterai kendaraan listrik (Gambar 6.6.). Transformasi ini meningkatkan nilai ekspor produk hilirisasi nikel secara signifikan dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri logam dan teknologi bersih (Grafik 6.10.). Selain itu, arus investasi asing

Gambar 6.5. Penguatan Industri Manufaktur Prioritas

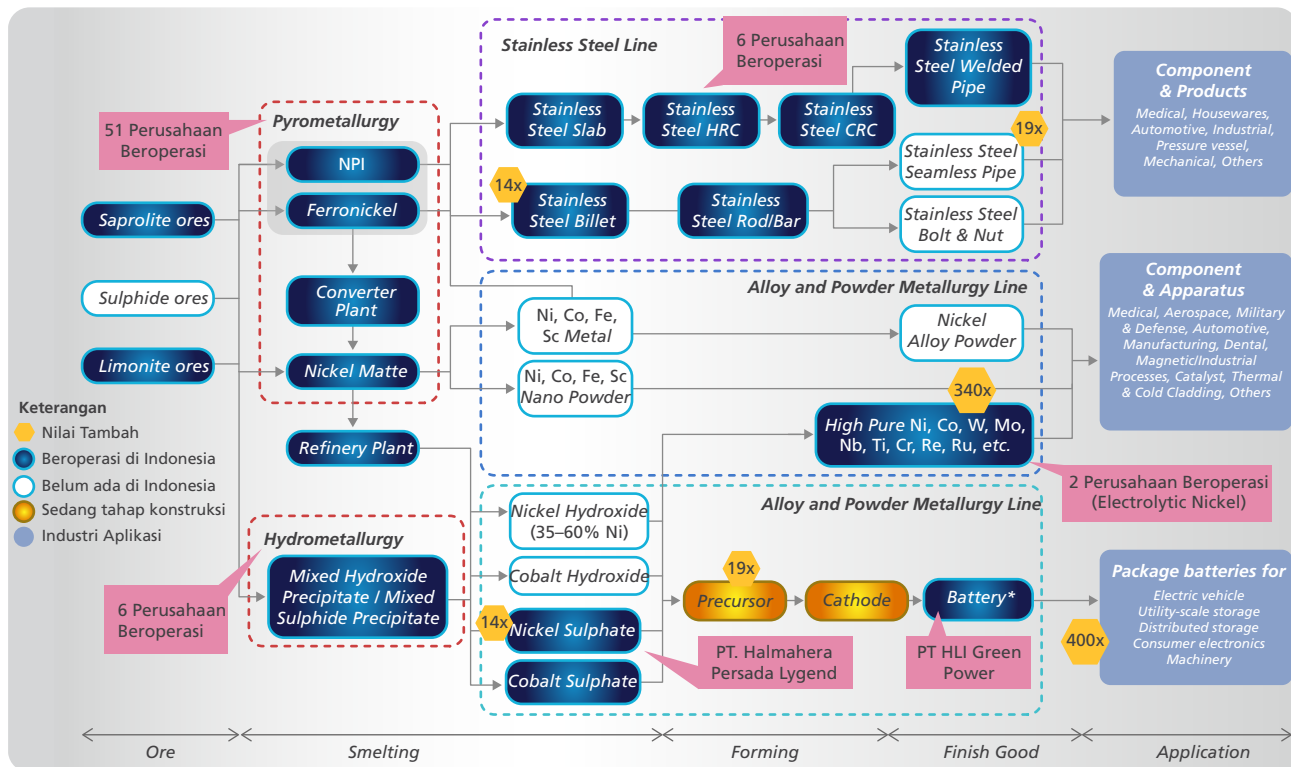


Sumber: Bank Indonesia

(*foreign direct investment/*FDI) juga meningkat, khususnya pada pembangunan *smelter* dan kawasan industri terintegrasi yang membawa masuk modal, teknologi, serta akses pasar global. Lebih jauh, dampak kebijakan hilirisasi nikel melampaui aspek perdagangan dan investasi dengan mendorong terbentuknya sentra-sentra industri baru di luar Jawa, seperti di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pembangunan sentra industri di wilayah tersebut telah mengakselerasi transformasi ekonomi lokal dari wilayah berbasis kegiatan primer pertanian dan pertambangan bahan mentah menjadi pusat industri pengolahan bernilai tambah tinggi. Struktur ekonomi daerah juga bergeser tecermin dari meningkatnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB daerah, penciptaan lapangan kerja nonpertanian, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi turunan, termasuk jasa logistik, konstruksi, perumahan, dan perdagangan (Gambar 6.7.). Dengan demikian, hilirisasi nikel tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan nilai tambah nasional, tetapi juga menjadi katalis pemerataan pembangunan, penguatan basis industri di luar Jawa, dan percepatan transformasi ekonomi daerah menuju struktur ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing.



Gambar 6.6. Pohon Industri Komoditas Nikel

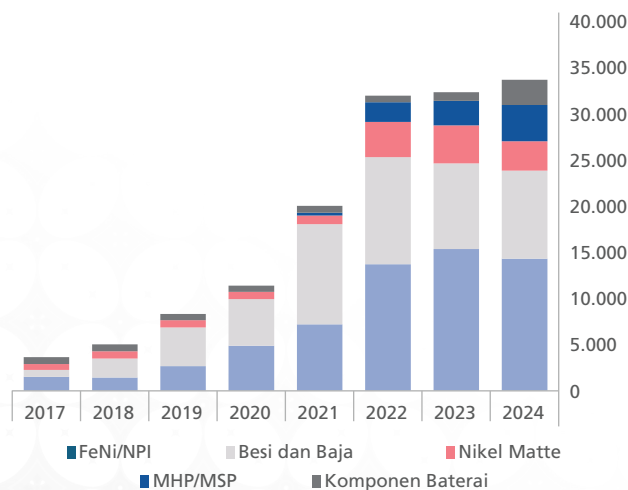


Sumber: Kementerian Perindustrian

Industrialisasi memerlukan penguatan peran dan dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta korporasi swasta, termasuk dalam pembiayaan investasi hilirisasi. Peran BUMN dan sektor swasta bersifat komplementer dan saling melengkapi. BUMN berperan sebagai jangkar (*anchor*) industrialisasi, terutama pada sektor prioritas yang strategis dan padat modal. Dalam

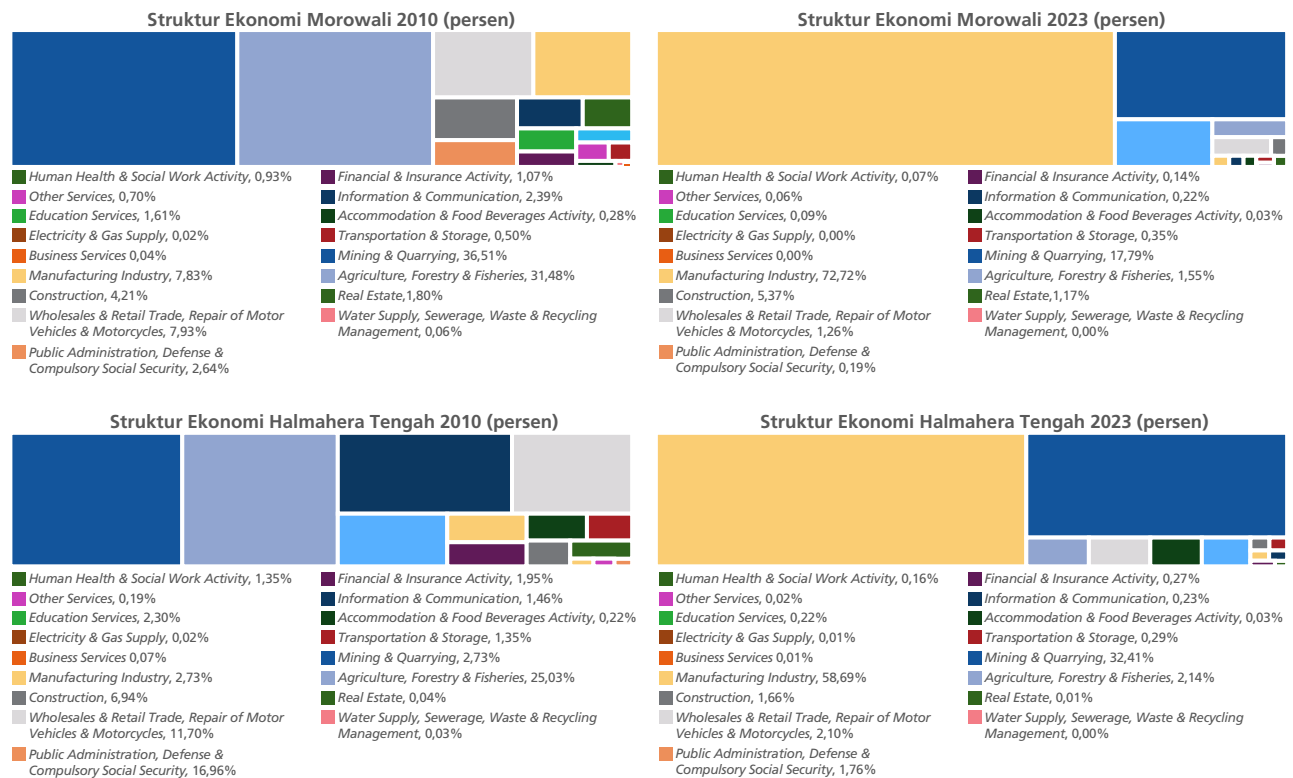
hal ini, BUMN berfungsi untuk membuka jalan pengembangan hilirisasi. BUMN juga berperan dalam menciptakan pasar dan ekosistem industri hilirisasi. Sementara itu, peran korporasi swasta krusial dalam hilirisasi antara lain melalui investasi, produksi, dan inovasi hilirisasi. Korporasi swasta asing berperan sebagai akselerator industrialisasi serta pintu utama masuknya teknologi dan rantai nilai global. Selanjutnya, peran sektor swasta sangat penting dalam pembiayaan investasi seiring dengan kemampuan pembiayaan dari fiskal yang terbatas.

Grafik 6.10. Ekspor Produk Hilirisasi Nikel



Industrialisasi melalui hilirisasi dapat berfungsi sebagai mesin pemerataan ekonomi yang mendukung struktur ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hilirisasi memperkuat ekonomi masyarakat lokal melalui kemitraan industri dengan komunitas dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berperan dalam rantai nilai hilirisasi melalui penyediaan bahan baku dan hilirisasi dalam skala kecil serta distribusi produk hilirisasi di pasar lokal. Selain itu, pembangunan industri hilirisasi dan KI/KEK di luar Pulau Jawa mendorong pemerataan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru di luar Pulau Jawa.

Gambar 6.7. Struktur Ekonomi Daerah Sentra Hilirisasi Nikel



Sumber: CEIC, diolah

Kemitraan strategis industri hilirisasi dengan masyarakat dan UMKM terus diperluas. Sinergi antara korporasi hilirisasi, masyarakat, Pemerintah daerah, dan UMKM terus diperkuat melalui hubungan yang saling menguntungkan. Kontribusi perusahaan hilirisasi dalam mengembangkan bisnis UMKM lokal dapat diperluas dalam keterlibatan rantai lokal lokal. Di beberapa wilayah, perusahaan hilirisasi telah melibatkan masyarakat setempat dalam perekrutan tenaga kerja serta penyediaan barang dan jasa lokal. Selain itu, perusahaan juga turut mengembangkan ekosistem UMKM di sekitar seperti warung makan, penyewaan tempat tinggal, dan penyediaan logistik untuk karyawan dan masyarakat sekitar. Model ini dapat menjaga keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang, kesejahteraan yang lebih merata, serta memperkuat struktur ekonomi daerah.

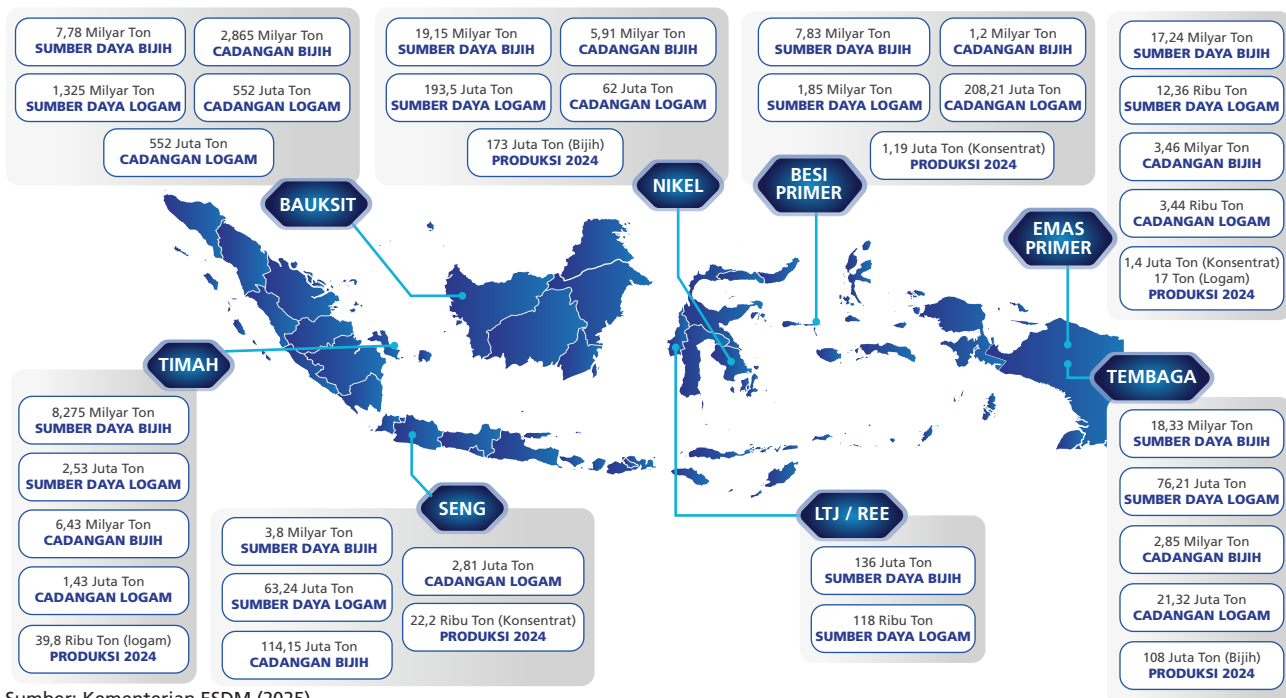
Ke depan, prospek permintaan global terhadap komoditas ekspor unggulan Indonesia diprakirakan tetap kuat, mendukung keberlanjutan kebijakan hilirisasi. Prospek kenaikan tersebut sejalan dengan perkembangan industri hijau dan energi baru terbarukan (EBT),

elektronik, aktivitas konstruksi, dan kebutuhan pangan global yang terus naik. Permintaan komoditas nikel terus meningkat yang bersumber dari kebutuhan industri mobil listrik dan industri EBT lainnya. Prospek permintaan bauksit tetap kuat didukung kebutuhan industri hijau seperti mobil listrik, panel surya, dan turbin angin. Sementara itu, prospek permintaan kelapa sawit akan terus meningkat, terutama untuk kebutuhan pangan dan biodiesel dan prospek permintaan rumput laut masih meningkat khususnya permintaan terkait dengan industri biostimulan dan pangan.

Prospek permintaan global yang meningkat didukung oleh ketersediaan cadangan mineral dan lahan yang memadai. Ketersediaan cadangan dan luas lahan dari hampir seluruh komoditas unggulan Indonesia menduduki peringkat sepuluh besar dunia dan tersebar di berbagai daerah (Gambar 6.8.). Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, terutama berada di Sulawesi serta Maluku Utara. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan timah terbesar kedua di dunia yang terkonsentrasi di Kepulauan Bangka Belitung. Cadangan bauksit Indonesia



Gambar 6.8. Peta Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Komoditas Utama Tahun 2024



Sumber: Kementerian ESDM (2025)

juga besar dengan peringkat keenam dunia yang tersebar di Kalimantan, Sumatra, dan Jawa. Sementara itu, Indonesia juga sebagai produsen kelapa sawit dengan luas lahan terbesar di dunia yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan. Produksi rumput laut Indonesia juga menjadi yang kedua terbesar di dunia dengan sentra produksi yang tersebar di berbagai daerah. Cadangan logam tanah jarang juga melimpah, terutama di Sulawesi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi logam tanah jarang sangat besar di dunia.

Penguatan hilirisasi ke depan perlu didukung dengan optimalisasi riset dan inovasi.

Keberhasilan industrialisasi di Korea Selatan dan Tiongkok antara lain didukung oleh R&D yang kuat. Sementara itu, peran R&D di Indonesia dalam mendorong *industrial upgrading*, termasuk pendalaman hilirisasi, penguasaan teknologi, dan pengembangan produk bernilai tambah tinggi, masih belum optimal. Kondisi ini tercermin antara lain dari anggaran belanja negara untuk peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan inovasi yang hanya sekitar 0,28% PDB. Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan dengan

Korea Selatan (4,81% PDB), Thailand (1,31% PDB), dan Malaysia (1,04% PDB) pada tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah menargetkan peningkatan belanja untuk riset dan inovasi secara bertahap hingga mencapai 0,45% PDB pada 2029. Selanjutnya, pada jangka menengah, Pemerintah melakukan penguatan kebijakan riset dan inovasi yang diarahkan pada peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan manajemen talenta nasional. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional dilakukan dengan pengembangan ekosistem terintegrasi hingga hilirisasi dan pemanfaatannya terutama di industri.

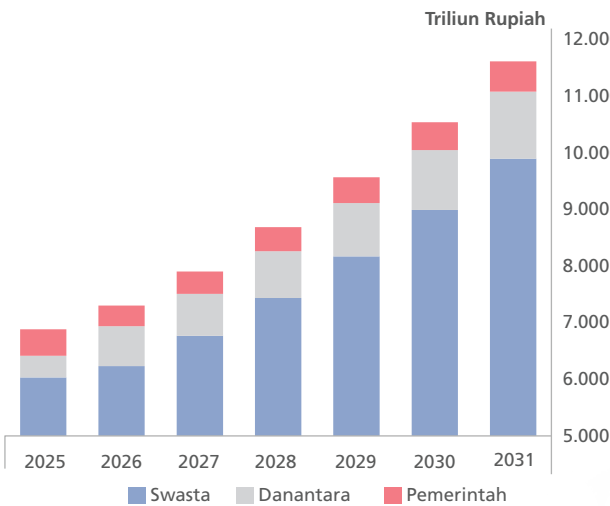
6.3.4. Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan Industrialisasi Nasional

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan industrialisasi sangat ditentukan oleh model pembiayaan yang tepat. Tiongkok, misalnya, mengandalkan pembiayaan konsorsium perbankan yang didukung oleh kebijakan industri dan insentif

fiskal (Geißendörfer & Haas, 2022). Korea Selatan mengombinasikan peran konglomerasi industri (*chaebol*) dengan dukungan kredit ekspor dan pembiayaan jangka panjang (Lim, 2012). Sementara itu, negara produsen mineral seperti Chili dan Australia memanfaatkan sinergi antara perusahaan nasional, *sovereign wealth fund*, serta skema kemitraan Pemerintah dan badan usaha (Mami, 2023; Britt & Czarnota, 2024). Pembelajaran dari praktik internasional tersebut menegaskan pentingnya peran negara dalam keberhasilan industrialisasi, terutama dalam menurunkan risiko investasi awal dan menciptakan kepastian usaha.

Kebutuhan modal dan investasi untuk program transformasi sektor riil, khususnya hilirisasi dan industrialisasi SDA dan sektor prioritas lainnya, sangatlah besar yang tidak mungkin sepenuhnya berasal dari APBN. Total kebutuhan investasi pada jangka menengah 2025–2031 diperkirakan mencapai Rp62,54 ribu triliun atau meningkat dari Rp6,88 ribu triliun pada 2025 menjadi Rp11,63 ribu triliun pada 2031 (Grafik 6.11.). Kebutuhan investasi tersebut akan dibiayai oleh tiga sumber, yaitu Pemerintah, BUMN, termasuk Danantara, dan swasta. Dengan mempertimbangkan keterbatasan ruang fiskal, termasuk fokus anggaran pada program sosial dan batas defisit fiskal tidak lebih dari 3% PDB, pembiayaan investasi dari APBN selama periode tersebut diperkirakan berjumlah Rp3,15

Grafik 6.11. Prakiraan Total Investasi dan Sumber Pembiayaan 2025–2031



Sumber: Bank Indonesia, diolah

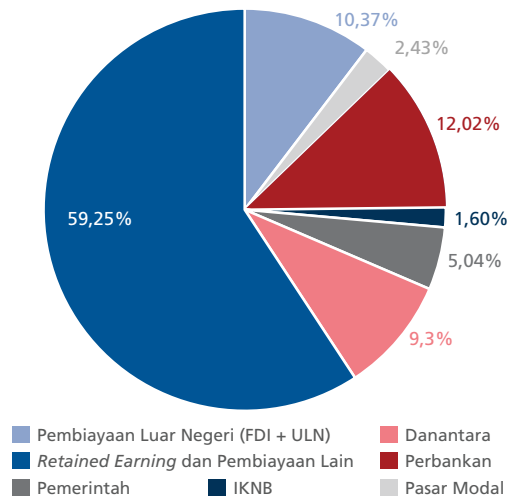
ribu triliun atau 5,0% dari total kebutuhan. Sementara itu, pembiayaan investasi dari BUMN dan Danantara diperkirakan mencapai sekitar Rp5,84 ribu triliun atau 9,3% selama periode yang sama. Kontribusi terbesar dari pemenuhan pembiayaan untuk kebutuhan investasi berasal dari swasta, yang diperkirakan berjumlah Rp53,56 ribu triliun atau sekitar 85,6% dari total kebutuhan. Besarnya kebutuhan pembiayaan investasi dari swasta menjadi tantangan terbesar untuk keberhasilan implementasi kebijakan transformasi sektor riil. Tantangan ini semakin menuntut perlunya perumusan model bisnis yang jelas, penguatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas adopsi teknologi dalam program hilirisasi dan industrialisasi SDA sehingga secara komersial menguntungkan baik bagi penanam modal dalam negeri maupun investor asing.

Sinergi kebijakan antara Pemerintah, Danantara, KSSK, dan Bank Indonesia perlu diperkuat untuk eksplorasi sumber-sumber pembiayaan dari swasta dalam memenuhi kebutuhan investasi yang sangat besar ke depan. Sesuai dengan pola pembiayaan investasi swasta yang telah berjalan selama ini, sekitar 59,25% dari total kebutuhan investasi swasta pada periode 2025–2031, atau sekitar Rp37,1 ribu triliun, diperkirakan bersumber dari dana internal perusahaan, baik yang berasal dari laba disisihkan (*retained earnings*) maupun sumber pembiayaan internal lainnya (Grafik 6.12.). Selain itu, sumber pembiayaan swasta juga bisa berasal dari pembiayaan luar negeri dalam bentuk PMA atau pinjaman luar negeri diperkirakan mencapai sekitar 10,37% dari total kebutuhan swasta atau setara dengan Rp6,5 ribu triliun. Tambahan pembiayaan swasta berikutnya berasal dari kredit/pembiayaan perbankan sekitar

Sinergi kebijakan antara Pemerintah, Danantara, KSSK, dan Bank Indonesia perlu diperkuat untuk mendukung pembiayaan industrialisasi



**Grafik 6.12. Prakiraan Komposisi Sumber
Pembiayaan Investasi 2025–2031**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

12,02% dari kebutuhan investasi swasta, atau setara dengan Rp7,52 ribu triliun pada periode yang sama. Selebihnya, pembiayaan swasta akan berasal dari pasar modal dan lembaga keuangan nonbank. Untuk proyek-proyek baru dengan keterbatasan pendanaan dari dana internal, pemenuhan kebutuhan investasi melalui kredit/ pembiayaan perbankan serta pembiayaan luar negeri akan lebih besar.

Sinergi kebijakan untuk mobilisasi pembiayaan dari empat sumber utama pembiayaan, yaitu dana sendiri, perbankan, PMA, dan anggaran Pemerintah perlu dioptimalkan untuk dapat mencapai pertumbuhan yang tinggi dalam lima tahun ke depan. Dalam hal ini, sinergi difokuskan kepada empat aspek, yaitu struktur pembiayaan proyek yang optimal, sumber pembiayaan yang tepat, kebutuhan likuiditas dan lindung nilai, serta edukasi dan literasi keuangan. Struktur pembiayaan proyek dapat berasal baik dari swasta, seperti kredit/ pembiayaan dari perbankan, penerbitan obligasi atau surat berharga lain di pasar modal dalam negeri, maupun pinjaman dari investor luar negeri. Selain itu, sebagian proyek memberikan keuntungan secara komersial sehingga kebutuhan investasinya dapat sebagian besar dipenuhi dari swasta baik modal sendiri, kredit perbankan, maupun pinjaman dan penanaman

modal asing. Namun, sebagian proyek lain masih memerlukan pembiayaan sebagian dan insentif fiskal dari Pemerintah untuk memperkuat kelayakan komersialnya. Insentif fiskal dan/atau kebijakan lain dari Pemerintah dimaksud termasuk tarif pajak, subsidi bunga, dan kepastian kebijakan Pemerintah, khususnya dalam masa tunggu (*grace period*) sejak tahap konstruksi sampai dengan tahap awal operasi.

Danantara berperan penting baik dalam implementasi model bisnis maupun pembiayaan investasi ke dalam proyek-proyek hilirisasi dan industrialisasi SDA. Dalam hal ini, Danantara berperan sebagai pengungkit pembiayaan jangka panjang (*anchor investor*) untuk mempercepat hilirisasi dengan menurunkan risiko proyek tahap awal, memastikan terbentuknya ekosistem hulu-hilir, dan menarik investasi swasta. Dalam menentukan prioritas investasinya, Danantara mempertimbangkan setidaknya tiga hal utama, yaitu (i) dampak terhadap perekonomian nasional; (ii) imbal hasil yang berkelanjutan; dan (iii) peluang investasi yang dapat diwujudkan. Berdasarkan tiga pertimbangan tersebut, Danantara memfokuskan portofolio investasinya kepada delapan sektor prioritas, yaitu (i) sektor mineral pada komoditas nikel dan bauksit, (ii) energi terbarukan pada produk lanjutan migas, (iii) infrastruktur digital pada pusat data, (iv) kesehatan pada pembangunan fasilitas fraksionasi plasma darah dan mata rantai rumah sakit, (v) jasa keuangan pada sekuritisasi aset dan kredit, (vi) sarana dan prasarana pada pengolahan limbah dan infrastruktur pertambangan, (vii) pengembangan kawasan industri, serta (viii) pangan dan pertanian. Pengembangan model bisnis yang menguntungkan secara komersial dari hilirisasi dan industrialisasi pada sektor-sektor prioritas sangat penting agar menarik bagi penanaman modal, baik oleh Pemerintah melalui Danantara, maupun swasta dari dalam dan luar negeri. Dalam implementasinya, Danantara dapat memperkuat *bankability* proyek hilirisasi melalui kombinasi instrumen ekuitas, *project financing*, dan *co-investment* dengan mitra strategis, termasuk membuka akses pendanaan eksternal.

6.4. Sinergi Kebijakan Struktural dan Industrialisasi

Transformasi ekonomi menuju industrialisasi yang berkelanjutan menuntut koordinasi kebijakan yang kuat dan konsisten lintas otoritas serta sinergi antara kebijakan struktural dan industrial. Keberhasilan industrialisasi di negara lain didukung sinergi yang kuat antara Pemerintah, swasta, dan otoritas lain serta dibarengi dengan kebijakan struktural sebagai fondasi. Di Korea Selatan, keberhasilan industrialisasi ditopang kebijakan yang terintegrasi antara Pemerintah, bank sentral, perbankan, dan industri, dengan *chaebol* sebagai motor utama. Begitu juga di Tiongkok, kebijakan hilirisasi terintegrasi lintas otoritas dan swasta, dengan dominasi peran Pemerintah, mendukung keberhasilan industrialisasi di negara tersebut. Kebijakan industrialisasi di kedua negara tersebut didukung oleh kebijakan struktural antara lain berupa tata kelola yang *govern* dan kegiatan R&D yang kuat.

Bauran kebijakan reformasi struktural dengan kebijakan industrialisasi sebagai alternatif pengembangan sektor prioritas. Kebijakan struktural lebih sulit diimplementasikan karena ketergantungan pada birokrasi Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, kombinasi kebijakan reformasi struktural dan kebijakan industrial dapat menjadi pilihan.

Langkah ini dapat ditempuh dengan menerapkan kebijakan industrial untuk mendorong produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor-sektor unggulan di kawasan ekonomi khusus sebagai pusat-pusat pertumbuhan, yang di dalamnya ditempuh kebijakan reformasi untuk perbaikan iklim investasi, infrastruktur konektivitas, perbaikan tata kelola dan birokrasi kelembagaan, serta pengembangan inovasi dan riset untuk percepatan adopsi teknologi. Dalam kaitan ini, pengembangan sejumlah KI dan KEK seperti di Batang, Sei Mangkei, dan Weda Bay, sebagai pusat-pusat pertumbuhan untuk hilirisasi dan industrialisasi SDA dan sektor-sektor unggulan lain sebagai langkah kebijakan yang tepat dalam kombinasi kebijakan industrial dan kebijakan struktural tersebut.

Reformasi kebijakan di KI/KEK perlu diakselerasi untuk menjadikan kawasan sebagai mesin hilirisasi dan industrialisasi yang berdaya saing. Berdasarkan pembelajaran dari berbagai negara, kunci keberhasilan pengembangan KI/KEK adalah tersedianya infrastruktur dan utilitas yang andal, termasuk konektivitas logistik, akses energi, serta layanan dasar kawasan. Selain itu, pasokan tenaga kerja terampil diperlukan melalui penguatan *link and match* dan pelatihan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah deregulasi atau penyederhanaan perizinan yang terintegrasi dan kepastian lahan, disertai kemudahan





akses pembiayaan dan skema pendanaan yang sesuai karakteristik proyek industri. Reformasi kebijakan tersebut perlu dilakukan secara *tailor-made* sesuai dengan karakteristik tiap kawasan dan intensitas itu yang dihadapi. Pada RPJPN 2025-2045, Pemerintah telah memetakan tematik transformasi ekonomi berdasarkan wilayah di mana industri berbasis sumber daya alam akan difokuskan di Pulau Sumatra dan Sulawesi (Gambar 6.9.). Di sisi pembiayaan, akses pendanaan jangka panjang perlu diperluas melalui penguatan perbankan dan lembaga pembiayaan, skema *project financing/blenden finance*, serta insentif yang selektif dan berbasis kinerja agar investasi masuk lebih cepat dan rantai nilai terbangun dari hulu ke hilir.

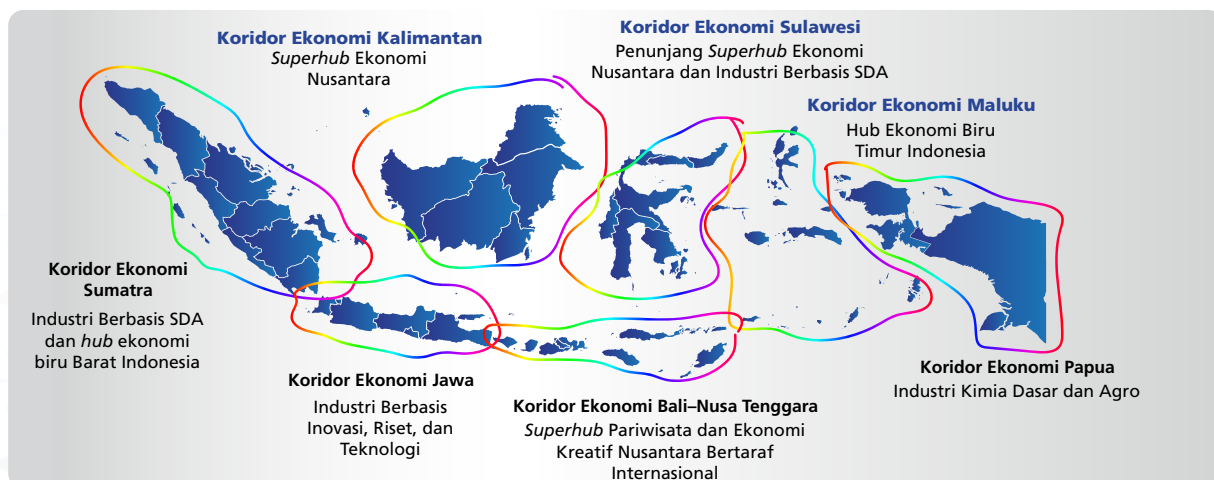
Pengembangan beberapa KEK/KI berpotensi menjadi model bisnis hilirisasi ke depan didukung insentif yang memadai, lokasi strategis, serta infrastruktur dan utilitas kawasan yang andal. Berdasarkan pembelajaran pada tiga contoh kawasan, KI Batang menunjukkan bahwa kombinasi lokasi yang dekat dengan pusat pasar dan logistik, paket insentif investasi, serta penguatan konektivitas, termasuk dukungan pelabuhan dan akses transportasi, dapat mempercepat masuknya *tenant* dan mendorong peningkatan ekspor berbasis manufaktur. KI Weda Bay menegaskan pentingnya ketersediaan energi yang cukup dan berkelanjutan serta kepastian perizinan sebagai prasyarat ekspansi kawasan hilirisasi mineral agar investasi lanjutan

dapat berjalan tanpa hambatan. Sementara itu, KEK Sei Mangkei menggambarkan kebutuhan reformasi yang lebih spesifik, terutama insentif harga energi dan percepatan infrastruktur pendukung. Konektivitas logistik ke pelabuhan, penyediaan hunian tenaga kerja, penguatan pengelolaan limbah, serta percepatan penyelesaian dokumen lingkungan merupakan infrastruktur pendukung yang diperlukan agar kawasan mampu meningkatkan daya saing dan menarik investasi industri hilir secara berkelanjutan.

Sinergi kebijakan struktural dan industrial memastikan reformasi jangka panjang fondasi ekonomi mendukung arah pengembangan industri. Sinergi kedua kebijakan tersebut tidak terjadi otomatis melainkan harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis. Setidaknya sinergi kebijakan struktural dan industrial tecermin dari 5 (lima) pendekatan berikut:

Pertama, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sebagai prasyarat keberhasilan industrialisasi harus tetap terjaga. Dalam hal ini, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja yang produktif namun dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Insentif dan stimulus fiskal dalam mendukung industrialisasi dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal. Kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan untuk turut mendukung

Gambar 6.9. Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Wilayah



Sumber: RPJPN 2025-2045



pertumbuhan ekonomi namun dengan tetap mencapai sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dengan kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia terus diarahkan untuk keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dengan mendorong pertumbuhan perekonomian. Selanjutnya, sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diarahkan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Kedua, kebijakan struktural dan industrial memiliki tujuan kebijakan yang sama dalam mentransformasi sektor riil guna mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Sinergi kebijakan struktural dan industrial sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, modal, dan tenaga kerja. Kebijakan struktural fokus pada penguatan fondasi perekonomian melalui perbaikan iklim investasi, persaingan usaha yang sehat, konektivitas infrastruktur, serta kebijakan perdagangan dan investasi. Sementara kebijakan industrial diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produksi dari sektor-sektor ekonomi tertentu yang menjadi prioritas nasional. Sinergi kedua kebijakan tersebut dapat tercapai apabila kebijakan struktural juga dirancang untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang selaras dengan kebijakan industrial. KI/KEK merupakan salah satu model sinergi kebijakan struktural dengan industrial. Kebijakan industrial di KI/KEK biasanya diterapkan untuk mendorong produktivitas sektor unggulan tertentu sebagai pusat pertumbuhan. Kebijakan ini didukung dengan reformasi struktural untuk perbaikan iklim investasi, infrastruktur konektivitas, perbaikan tata kelola dan birokrasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan R&D untuk percepatan adopsi teknologi. Pada jangka panjang, Pemerintah telah memetakan tematik transformasi ekonomi berdasarkan wilayah di mana industri berbasis sumber daya alam akan difokuskan di Pulau Sumatra dan Sulawesi. Dengan demikian, sinergi kebijakan struktural dan industrial ke depan akan lebih terarah berdasarkan karakteristik wilayahnya. Selanjutnya, kebijakan struktural

juga mendukung berkembangnya UMKM sebagai mitra strategis industri hilirisasi. Dalam hal ini, UMKM berperan dalam penyediaan bahan baku, pengolahan awal, jasa logistik dan pendukung, pengolahan produk dalam skala kecil, serta distribusi dan pemasaran lokal. Peran UMKM dalam industrialisasi mendukung perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketiga, industrialisasi memerlukan pendanaan investasi yang besar, karenanya diperlukan kebijakan struktural guna mempermudah perolehan pembiayaan untuk investasi. Pemerintah memegang peran strategis kebijakan industrial melalui penyediaan insentif dan penguatan regulasi hilirisasi. Selain itu, peran Pemerintah juga sangat penting dalam kebijakan struktural melalui perbaikan iklim investasi, antara lain berupa penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian hukum serta kemudahan berusaha untuk menarik investasi industri jangka panjang. Bank Indonesia mendukung kebijakan Pemerintah dengan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut sesuai kondisi. Kebijakan moneter juga ditempuh melalui ekspansi likuiditas moneter untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga BI-Rate ke suku bunga perbankan, termasuk suku bunga kredit untuk sektor prioritas. Sementara itu, kebijakan makroprudensial tetap akan longgar untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan, khususnya pada sektor-sektor prioritas pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan Asta Cita Pemerintah. Bank Indonesia juga mendukung pembiayaan industrialisasi melalui pendalaman pasar keuangan dengan pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA). Selanjutnya, sinergi antara Bank Indonesia dengan OJK dilakukan dalam rangka optimalisasi kredit dan terjaganya risiko sistem perbankan. Sinergi pengembangan pasar keuangan dalam KSSK dan dengan kementerian/lembaga, otoritas, dan pelaku terus dilakukan untuk inovasi instrumen pembiayaan ekonomi dan lindung nilai. Selain itu, Bank Indonesia bersinergi dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan KSSK juga terus mendorong perbankan untuk



menurunkan suku bunganya dan mendorong penyaluran kredit/pembiayaan sektor-sektor prioritas. Penguatan sinergi juga dilakukan untuk kebijakan Pemerintah, Danantara, KSSK, dan Bank Indonesia dalam rangka eksplorasi sumber-sumber pembiayaan dari sektor swasta.

Keempat, reformasi struktural melalui pembangunan konektivitas infrastruktur fisik dan digital sebagai fondasi kebijakan industrialisasi. Pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan peta industrialisasi. Ketersediaan infrastruktur fisik yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, termasuk ketersediaan infrastruktur dasar di KI/KEK, sangat diperlukan agar industrialisasi dapat berjalan. Selanjutnya, infrastruktur logistik yang terintegrasi antarmoda mendukung rantai nilai hilirisasi. Pembangunan infrastruktur digital mendukung hilirisasi melalui peningkatan efisiensi, memperkuat rantai nilai yang terintegrasi, dan menurunkan biaya transaksi dan logistik, serta memperluas akses pasar dan integrasi global. Dalam hal ini, Bank Indonesia turut mendukung melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran.

Kelima, kebijakan industrialisasi yang berorientasi ekspor didukung dengan kebijakan kerja sama perdagangan dan investasi internasional. Indonesia telah menjalin kerja sama ekonomi baik bilateral, regional, maupun multilateral untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman strategis dengan Tiongkok untuk investasi di sektor manufaktur, energi baru terbarukan, dan logistik. Kerja sama ini bertujuan untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi UMKM dalam rantai pasok global. Dalam hal kerja sama internasional, Bank Indonesia terus meningkatkan pengelolaan persepsi positif kepada investor dan lembaga *rating* untuk mendukung iklim investasi serta melakukan promosi perdagangan dan investasi melalui Investor Relation Unit (IRU) Bank Indonesia.